

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Gambaran Umum.....	1
I.2 Sumber Daya SKPD.....	10
I.3 Struktur Organisasi.....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.....	15
II.2 Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021.....	16
II.3 Penetapan/Perjanjian Kinerja 2016.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	
III.1 Pengukuran Kinerja.....	23
III.2 Uraian Hasil Pengukuran Kinerja.....	24
III.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV PENUTUP	
IV. I Kesimpulan.....	47

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah (Eselon II ke atas) untuk menyiapkan Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas yang utuh. Laporan Kinerja selain berfungsi sebagai sarana bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur Jambi (Pemerintah Provinsi Jambi) dan masyarakat, juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Untuk memenuhi fungsi tersebut di atas, laporan akuntabilitas kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara garis besar LKj berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian 2018. Rencana Kinerja 2018 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2017 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Sementara itu, capaian kinerja merupakan realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2018, yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2019. Selanjutnya capaian kinerja yang memenuhi sasaran atau tidak memenuhi sasaran akan dianalisis lebih lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2019
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Jambi,

Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19640304 199203 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2016 dalam rangka pencapaian misi dan visi sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu kegiatan kinerja setiap unit kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

TUJUAN

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan Renstra 2016-2021 tujuan yang harus dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam periode lima tahun sejak ditetapkan Renstra tersebut adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan provinsi
2. Mewujudkan kualitas sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan.
3. Menurunkan kawasan lingkungan yang tidak layak huni.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas ke-PU-an serta SDM/aparatur untuk terlaksananya tugas dan fungsi secara professional dan handal

Tujuan-tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dengan sasarannya selama lima tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap.
2. Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
3. Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses.
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak.

Sebagai gambaran kinerja dari indikator – indikator yang mendukung sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selama tahun 2017 dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	Persentase Jalan Provinsi yang dalam kondisi Mantap	77,64%	76,57%
Berfungsinya Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	75%	76,5%
Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	74%	63,44%
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan pemukiman dan perumahan yang layak	1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	67%	47,57%
	2. Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%	25%	29%
	3. Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	36%	22,94%

Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi akan mempercepat terwujudnya prasarana dan sarana wilayah yang handal untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, pencapaian untuk tujuan lain umumnya meningkat secara kualitatif maupun kuantitatif.

Walaupun sasaran utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah cukup berhasil dicapai, namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih dijumpai dan kendala-kendala antara lain adalah menyangkut anggaran yang tidak memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan secara optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Dinas Pekerjaan Umum berganti menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan bidang Perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

Pembentukan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Perda No.45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi merupakan salah satu di antara beberapa dinas yang ada di Provinsi Jambi dan merupakan bagian Integral dari Pemerintah Provinsi Jambi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana melalui :

1. Bidang Sumber Daya Air
2. Bidang Bina Marga
3. Bidang Cipta Karya
4. Bidang Perumahan
5. UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan
6. UPTD Balai Pengujian
7. Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian
8. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
9. Bagian Sekretariat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor No.45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.. Dimana pada Bab II Bagian Pertama Pasal 46, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memiliki tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut :

Tugas Pokok : Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur Jambi

Dengan **Fungsinya**:

1. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
3. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dimana penyelenggaraan Tupoksinya tersebut SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Jambi memiliki struktur organisasi sebagai media pelaksana (Tim Leader) dalam melaksanakan tugas tersebut, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- Tugas** :
- a. Melaksanakan ketentuan sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan sekretariat, bidang , UPTD dan kelompok jabatan fungsional

2. Sekretariat

Tugas : Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan dibidangsekretariat serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.

fungsi :

- a. pengkoordinasi kegiatan dinas;
- b. pengkoordinasi dan penyusunan rencana program serta anggaran dinas;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi dinas;
- d. penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Tugas : Membantu dinas dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan perumusan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi;
- b. Penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten/kota;
- c. Pembinaan kepada kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang;

- d. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
- e. Penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- f. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;
- g. Pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang provinsi;
- h. Pengkoordiniran penyelenggaraan penataan ruang provinsi;
- i. Pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- j. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- k. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- l. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi;
- m. Penetapan subjek dan objek redisbrusi tana, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- n. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam wilyah provinsi;
- o. Penyelesaian tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota wilayah provinsi;
- p. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Tugas : Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka membantu bidangmelaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang sumber daya air serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- Fungsi :**
- a. pelayanan kebijakan daerah mengenai pengelolaan sumber daya air meliputi irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah;
 - b. penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai ;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
 - e. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
 - f. pengembangan dan penelitian tentang pengelolaan sda dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota
 - g. pelayanan kebijakan daerah tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/kota;
 - h. penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan sda dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/kota ;
 - i. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sda dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/kota;
 - j. pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
 - k. pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan, konservasi dan pemeliharaan serta evaluasi dibidang sumber daya air;
 - l. pengembangan sistem pembiayaan dibidang sumber daya air;
 - m. pelaksanaan fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelola dibidang sumber daya air; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Bina Marga

Tugas : Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang bina marga serta pelayan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- fungsi :**
- a. pelayanan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
 - b. penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;

- c. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
- d. pengembangan dan penelitian mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
- e. perumusan program dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
- f. perumusan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- g. pengkoordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- h. perumusan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- i. pengendalian pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- j. pengendalian pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- k. pengendalian pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan, pengujian;
- m. pengendalian penyusunan rencana teknis dan program kegiatan di bidang bina marga dalam wilayah provinsi jambi;
- n. pengendalian penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Bidang Cipta Karya

Tugas : Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang cipta karya serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- fungsi** :
- a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi;
 - b. penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
 - c. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung lingkup sektoral

- e. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan provinsi;
- f. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan provinsi;
- g. pengendalian, pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi;
- h. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi;
- i. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi;
- j. penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan dan penelitian untuk mendukung sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi;
- k. pembinaan dan penyusunan program tata bangunan dan lingkungan;
- l. pengelolaan dan pengendalian sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP); dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Bidang Perumahan Rakyat

Tugas : Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang perumahan rakyat serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- fungsi** :
- a. perumusan program dan kegiatan bidang perumahan rakyat;
 - b. pembinaan SDM bidang perumahan lintas kab/kota dan atau yang menjadi kewenangan provinsi;
 - c. pengembangan pusat informasi bidang perumahan tingkat provinsi;
 - d. pengendalianpenyiapan NSPM bidang perumahan yang menjadi kewenangan provinsi;
 - e. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
 - f. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi;
 - g. penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15ha;
 - h. penyelenggaraan PSU permukiman;
 - i. pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
 - j. perumusan kebijakan dan strategi provinsi dalam melaksanakan

- pengaturan, pembinaan dan pengendalian teknis perumahan formal;
- k. pengkoordinasian untuk fasilitasi dan perumusan kebijakan Provinsi dalam pembiayaan perumahan MBR;
 - l. perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang pendataan, pembangunan, kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. UPTD Balai Pengujian

Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis, tertentu yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dalam bidang pelayanan jasa Pengujian mutu air, mekanisme tanah, geologi dan bahan Bangunan.

- fungsi** :
- a. Penyusunan Program Kerja kegiatan kelaboratoriuman dengan mengacu pada kebijakan mutu laboratorium.
 - b. Penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana laboratorium
 - c. Pelayanan jasa pengujian
 - d. Pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengujian
 - e. Pengkoordinasian kegiatan kaji ulang manajemen laboratorium
 - f. Pembinaan terhadap pengelolaan peralatan laboratorium.
 - g. Pembinaan terhadap pengelolaan SDM laboratorium
 - h. Pelaksanaan kebijaksanaan yang berkaitan dengan jaminan mutu dan peningkatan profesionalisme laboratorium
 - i. Pengoordinasian pelaksanaan operasional pengujian.

9. Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian

Tugas : Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina konstruksi dan pengendalian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- fungsi**
- Pelayanan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
 - Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi;
 - Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi;
 - Pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi;
 - Peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi;
 - Pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi di wilayah provinsi;
 - Pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
 - Pembinaan teknis, pengendalian mutu pekerjaan dan penelitian di bidang pekerjaan umum dalam wilayah provinsi;
 - Penyelenggaraan bimbingan teknis, dan peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia lingkup dinas;
 - Penerapan norma standar prosedur dan metode konstruksi lingkup dinas;
 - Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup dinas; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

10. UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan

- Tugas** : Melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas PU dalam bidang pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengoperasian, pelayanan jasa, pengelolaan perbekalan dan logistik alat-alat berat dan alat-alat pendukung serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, program dan urusan rumah tangga balai.
- Fungsi** :
- pelayanan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
 - pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi;
 - penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi;
 - pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi;

- f. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi;
- g. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi;
- h. pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- i. pembinaan teknis, pengendalian mutu pekerjaan dan penelitian dibidang pekerjaan umum dalam wilayah provinsi;
- j. penyelenggaraan bimbingan teknis, dan peningkatan kemampuan teknis sumberdaya manusia lingkup dinas;
- k. penerapan norma standar prosedur dan metode konstruksi lingkup dinas;
- l. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

I.2. Sumber Daya SKPD

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memiliki Pegawai Negeri Sipil sebanyak **337** orang PNS, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pejabat struktural : 35 orang
- b. Pejabat Fungsional Teknis : - orang
- c. Staf Pelaksana : 251 orang

Gambar I.1

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Jambi Berdasarkan Jabatan s/d Tahun 2018



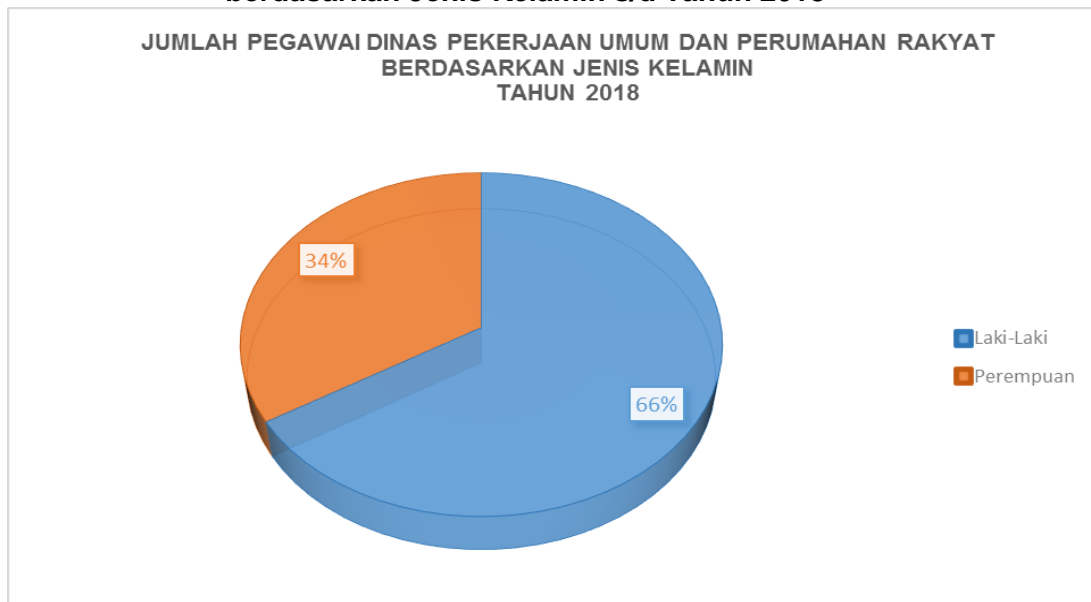
Sumber : Sub Bagian Umum Dinas PUPR Provinsi Jambi

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Jambi berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2018

- Laki-laki : 190 Orang
- Perempuan : 95 Orang

Gambar II.2

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Jambi berdasarkan Jenis Kelamin s/d Tahun 2018



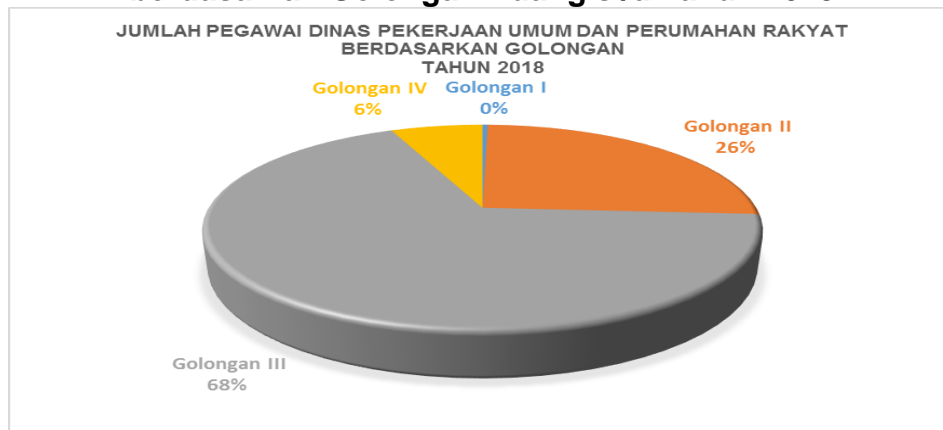
Sumber : Sub Bagian Umum Dinas PUPR Provinsi Jambi

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Jambi berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2016

- Golongan I : 1 Orang
- Golongan II : 74 Orang
- Golongan III : 193 Orang
- Golongan IV : 17 Orang

Gambar II.3

**Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi
berdasarkan Golongan Ruang s/d Tahun 2018**



Sumber : Sub Bagian Umum Dinas PUPR Provinsi Jambi

B. Aset Daerah

Berdasarkan Neraca laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Jambi per 31 Desember 2018, aset daerah yang menjadi kewenangan dan pengelolaan Dinas PU Propinsi Jambi, terdiri dari :

Tabel I.1
**Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
per 31 Desember 2018**

No	Uraian	Banyak	Nilai/Input (Rp)	%
1.	Tanah	94	73.389.014.332,00	
2.	Peralatan dan Mesin	5,207	117.710.834.234,49	
3.	Gedung dan Bangunan	53	75.316.387.118,69	
4.	Jalan, Jaringan dan instalasi	3,174	6.416.053.498.152,87	
Jumlah s/d 31 Desember 2018			6.682.469.733.838,05	

Tabel I.2
**Aset lainnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
per 31 Desember 2018**

No	Uraian	Banyak	Nilai/Input (Rp)	%
1.	Aset Tetap lainnya	966	227.040.451.582,28	
2.	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	
3.	Aset lainnya	7.687	514.197.225.521,42	
Jumlah s/d 31 Desember 2018			741.237.677.373,70	

Tabel I.3
Daftar Barang Inventaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2018

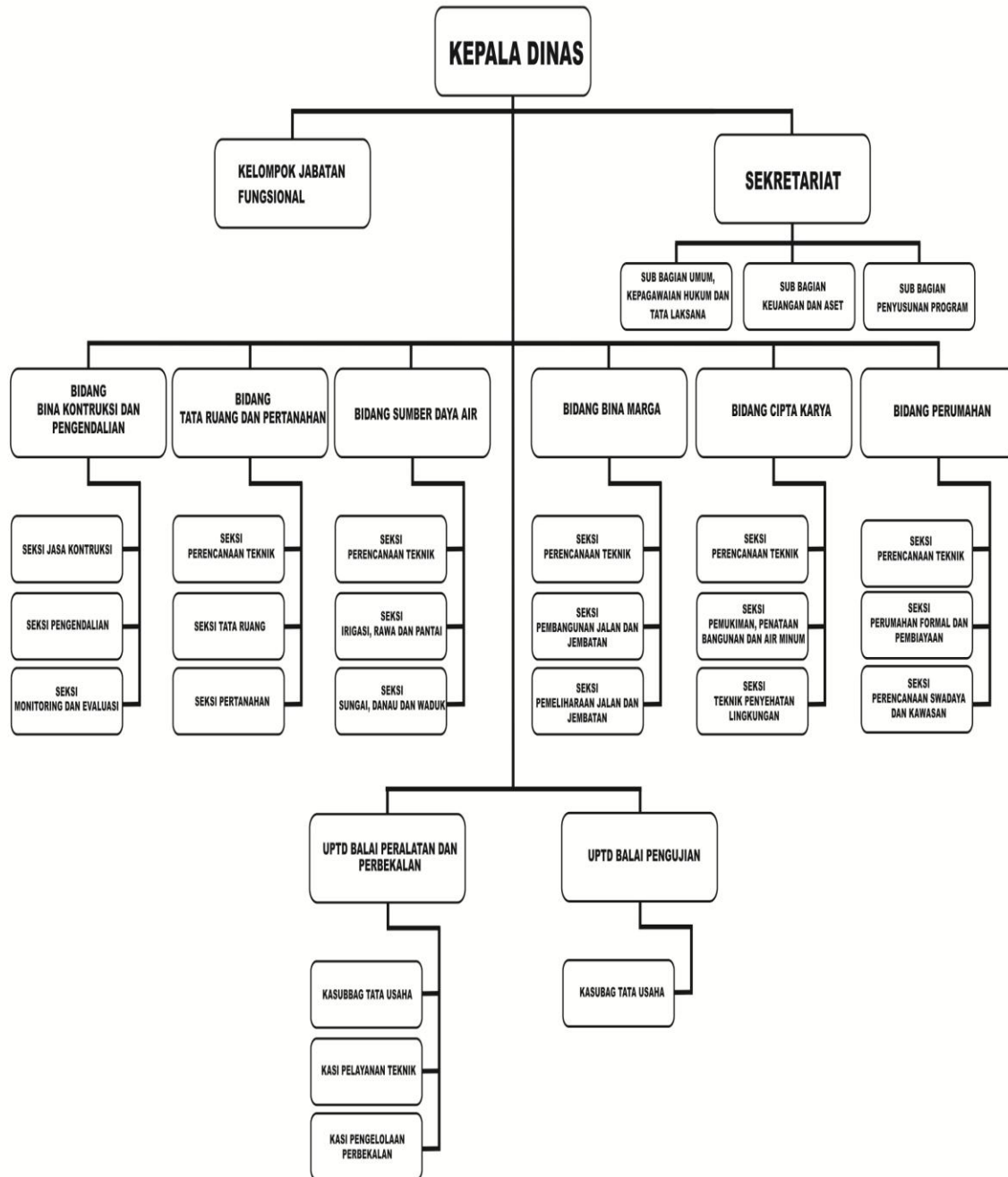
No	Uraian	Banyak	Jumlah (Rp)
1.	Tanah	94	73.389.014.332,00
2.	Peralatan dan Mesin	5.207	117.710.834.234,49
3.	Gedung dan Bangunan	53	75.316.387.118,69
4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	3.174	6.416.053.498.152,28
5.	Aset Tetap lainnya	966	227.040.451.852,28
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7.	Aset lainnya	7.687	514.197.225.521,42
Jumlah			7.423.707.411.211,75

I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dijelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memiliki Struktur Organisasi yang terdiri atas Kepala Dinas, Bagian Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, UPTD Balai Pengujian, UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan, Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan UPTD Jasa Konstruksi yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016

Gambar 1.4
Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021
2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021
3. Penetapan/Perjanjian Kinerja 2018

II.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021

RPJMD Provinsi Jambi 2016 – 2021 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. RPJMD memuat tentang visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2016-2021.

A. Visi Pembangunan Provinsi Jambi

“JAMBI TUNTAS 2021”

Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera

B. Misi Pembangunan Provinsi Jambi

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi, antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.

5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Adapun misi pembangunan tersebut yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu pada misi kelima dan keenam RPJMD periode 2016-2021.

C. Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi

Dalam upaya mewujudkan misi kelima dan keenam RPJMD 2016-2021 tersebut diatas, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut (Program Prioritas RPJMD yang berhubungan dengan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi) :

1. Program pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan
2. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
3. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
4. Program operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA
5. Program pengendalian daya rusak air, pengendalian banjir, dan pengamanan pantai
6. Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman
7. Program pemberdayaan jasa konstruksi

II.2. Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021

A. Visi

Visi menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 12 dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 9 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 adalah *Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.* Berkenaan dengan dasar aturan tersebut, Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi sepenuhnya mendukung Visi Gubernur Jambi selama 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 yaitu :

“ JAMBI TUNTAS 2021 ”

(Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera)

sebagai upaya terwujudnya layanan infrastruktur berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing menuju Jambi Tuntas 202.

B. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan berhasil dengan optimal serta sesuai dengan visi yang diinginkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan pihak-pihak yang berkepentingan (*costumer dan stakeholders*) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program- programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di waktu-waktu mendatang. Misi tersebut merupakan gambaran dalam mendukung misi kelima dan keenam pembangunan Gubernur Jambi periode 2016-2021, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana jalan provinsi
2. Meningkatkan tata kelola sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air.
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat dengan layanan infrastruktur dasar yang layak.
4. Meningkatkan kinerja dan kualitas pekerjaan melalui sumber daya manusia yang berkompetensi serta berdaya saing.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan suatu penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan, mengukur sejauh mana keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi tersebut.

Adapun **Tujuan** dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan provinsi
2. Mewujudkan kualitas sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan
3. Menurunkan kawasan lingkungan yang tidak layak huni
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas ke-PU-an serta SDM/aparatur untuk terlaksannya tugas dan fungsi secara professional dan handal.

Sasaran organisasi merupakan penjabaran dari kondisi tujuan yang ingin dicapai, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja. Penetapan sasaran organisasi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun **Sasaran** dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, antara lain :

1. Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap
2. Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
3. Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak
5. Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas.

D. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan cara mewujudkan sasaran SKPD agar lebih efektif dan efisien, antara lain :

1. Pemenuhan standar mutu jalan, kuantitas dan kualitas peralatan operasional, serta penanganan pembebasan lahan.
2. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air.
3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya air baku
4. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pemukiman dan perumahan yang layak.
5. Identifikasi data base sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkatan kerja konstruksi.

sedangkan **Kebijakan** merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai target – target sasaran, antara lain :

1. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi terutama akses menuju sentra produksi.
2. Mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi, rawa, dan pengairan lainnya.
3. Meningkatkan pengendalian terhadap daya rusak air.
4. Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan air baku
5. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman (TPA regional, pipa sanitasi, dan pengelolaan limbah/IPAL)
6. Peningkatan ketersediaan akan kebutuhan lingkungan layak huni bagi masyarakat.
7. Meningkatkan mutu angkatan kerja konstruksi melalui pelatihan tersertifikasi profesi.

E. Program Prioritas

Tidak lepas dari program prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi tahap ketiga tahun 2016-2021, untuk tercapainya tujuan dan sasaran renstra Dinas Provinsi Jambi, maka perlu beberapa program prioritas yang mendukung terlaksananya dengan baik hal tersebut, antara lain:

1. Program pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan
2. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
3. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
4. Program operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA
5. Program pengendalian daya rusak air, pengendalian banjir, dan pengamanan pantai
6. Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman
7. Program pemberdayaan jasa konstruksi

F. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi selaku Instansi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Menteri dimaksud. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang telah di selenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. IKU (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tabel II.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan
RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Selama Periode 2016-2021

Tujuan	Sasaran	IKU	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan provinsi	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	1. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Pemenuhan standar mutu jalan, kuantitas dan kualitas peralatan operasional, serta penanganan pembebasan lahan	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi terutama akses menuju sentra produksi
		2. Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi dalam kondisi mantap		
		3. Persentase panjang jalan provinsi yang memiliki drainase		
		4. Persentase pembangunan jembatan di jalan provinsi dalam kondisi baik		
Mewujudkan kualitas sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan	1. Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Persentase jaringan/ saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air	1. Mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi, rawa, dan pengairan lainnya
	2. Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	Meningkatkan pemanfaatan sumber air baku	2. Meningkatkan pengendalian terhadap daya rusak air
Menurunkan kawasan lingkungan yang tidak layak	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan pemukiman dan perumahan yang layak.	1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pemukiman dan perumahan yang layak. 2. Identifikasi database sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	1. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman (TPA Regional, pipa sanitasi, dan pengelolaan limbah/IPAL)
		2. Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%		2. Peningkatan ketersediaan akan kebutuhan lingkungan layak huni bagi masyarakat
		3. Persentase tersediannya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat		

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021

II.3. Penetapan/Perjanjian Kinerja 2018

Sasaran yang dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada Tahun 2016 tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN), antara lain :

1. Meningkatnya Jalan Provinsi dalam kondisi mantap
2. Berfungsinya Jaringan Irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya
3. Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan pemukiman dan perumahan yang layak

Table II.3
RKT dan TAPKIN (IKU) Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	1 Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap	78,07%
2.	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	2 Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	80,00%
3.	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	3 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	70,00%
4.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	4 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	72,00%
		5 Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%	30,00%
		6 Persentase tersediannya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	65,00%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana berikut :

Tabel III.1
Kerangka Pengukuran Kinerja

Persentase Pencapaian Sasaran	Kriteria
≥ 100 %	Sangat Baik
90-100 %	Baik
70 % - 89,99 %	Cukup Baik
50 % - 69,99 %	Kurang Baik
$\leq 49,99$ %	Tidak Baik

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran adalah bagai berikut :

Tabel III.2
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2018

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	77,64%	77,205%	99,43%	Baik

Sasaran Strategis 2				
Berfungsinya Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	78%	76,5%	102%	Sangat Baik

Sasaran Strategis 3				
Tersedianya Sumber Air Baku bagi Masyarakat untuk Mendukung Universal Akses				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	74%	1,5%	2,02%	Tidak Baik

Sasaran Strategis 4				
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman dan Perumahan yang Layak				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	67%	45,63%	68,10%	Kurang Baik
Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%	25%	0%	0%	Tidak Baik
Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	36%	22.94%	63.72%	Kurang baik

III.2. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada tahun 2018 ini telah menetapkan sebanyak 4 (Empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai, dimana sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan 6 Indikator Kinerja dengan capaian 2 (Dua) indikator telah dicapai dengan kategori hasil yang **“sangat baik”**, 1 (Satu) indikator dicapai dengan kategori hasil yang **“baik”**, 2 (Dua) indikator dicapai dengan kategori **“Cukup Baik”** dan 1 (satu) indikator dicapai dengan kategori **“Tidak Baik”**. Berikut uraian nya sebagai berikut :

A. Capaian kinerja Sasaran 1

Capaian kinerja sasaran 1, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada sasaran ini telah memberikan rata – rata capaian kategori **baik**.

Table III.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Tahun 2018

Meningkatnya Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	76,18%	77.205%	101%	Sangat Baik

Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan infrastruktur. Diawal periode 2018 ini tidak hanya dari segi jalan mantap provinsi saja, tapi jg indicator pendukung lainnya seperti jalan menuju akses sentra produksi yang mendukung program program prioritas terwujudnya Jambi Tuntas 2021. Adapun faktor yang mempengaruhi meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap ini yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu :

1. Kemampuan teknis
2. Pengawasan yang baik
3. Matangnya perencanaan

➤ Indikator “**Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap**”

Pencapaian pada indikator ini “**baik**” dimana rata – rata persentase peningkatannya pada tahun 2018 sebesar 99%. Hal tersebut kurang tercapai dengan dari target karena adanya rasionalisasi anggaran pada pertengahan tahun 2018.

$$\begin{aligned}
 \text{Kondisi Jalan mantap} &= \frac{\text{Kondisi Panjang Jalan Baik + Sedang}}{\text{Total Panjang jalan Provinsi}} \times 100\% \\
 \text{Kondisi Jalan mantap} &= \frac{412.236 \text{ km} + 385.202 \text{ km}}{1.032.884 \text{ km}} \times 100\% \\
 \text{Kondisi Jalan mantap} &= \frac{865.197 \text{ km}}{1.032.884 \text{ km}} \times 100\% \\
 \text{Kondisi Jalan mantap} &= 77.205\%
 \end{aligned}$$

B. Capaian kinerja sasaran 2

Capaian kinerja sasaran 2, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada sasaran 2 (dua) ini telah memberikan capaian yang meningkat dari tahun sebelumnya menjadi **Sangat Baik** ini terlihat dari angka realisasi rata-rata 101 persen.

Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Tahun 2018

Sasaran Strategis 2				
Berfungsinya Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	78%	77,2%	98.9%	Baik

$$\text{Persentase Jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik} = \frac{\text{Luas realisasi yang dicapai}}{\text{Total luasan irigasi kewenangan Provinsi}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik} = \frac{4.654 \text{ ha}}{6.029 \text{ ha}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik} = 77.2\%$$

Persentase fungsionalisasi daerah irigasi pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Persentase fungsionalisasi daerah irigasi sama artinya dengan meningkatkan lahan pertanian. Bila dibandingkan dengan target Persentase fungsionalisasi daerah irigasi yang tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja 2018 realisasi Persentase fungsionalisasi daerah irigasi pada tahun 2018 sebanyak 76,5% persen.

Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional ditandai dengan Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatnya lahan pertanian. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu terdiri atas

2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu kemampuan teknis, pengawasan yang baik, matangnya perencanaan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah dan kerjasama dengan Dinas Pertanian. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu aksesibilitas dan kondisi lahan pertanian. Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 guna mendukung

pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada peningkatan dibidang irigasi. Sepanjang tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan air lainnya ini dilaksanakan kegiatan pendukungnya yaitu Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, dengan capaian pelaksanaan kegiatan 4.480 Ha.

Tabel III.5
DI Potensial Berdasarkan kewenangan Provinsi
Tahun 2018

No	DI Potensial Berdasarkan kewenangan Provinsi (berdasarkan Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 Tanggal 21 April 2015)		Realisasi DI fungsional Tahun 2018 (ha)	Capaian %
	Nama Daerah Irigasi	Luas (ha)		
1.	DI.Sungai Batang Uleh	2.043	1.831	89.6
2.	DI.Sungai Tanduk	1.265	1.063	84.1
3.	DI.Sungai Suban	1.121	1.114	99.4
4.	DI.Sungai Limun Singkut	1.600	646	40.4
Jumlah		6.029	4654	77.2

C. Capaian kinerja sasaran 3

Capaian kinerja sasaran 3, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada sasaran 3 (tiga) ini merupakan target MDG'S Provinsi Jambi, dengan capaian **Baik**

dengan rata-rata capaian 97 persen. Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 3 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Tahun 2018

Sasaran Strategis 3				
Tersedianya Sumber Air Baku bagi Masyarakat untuk Mendukung Universal Akses				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	74%	49,07%	66,3%	Kurang Baik

Bila dilihat realisasi capaian kinerja tersebut diatas, terlihat bahwa terjadi proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan menurun dari tahun sebelumnya 65,12% menjadi 63,44%. Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta dan kemiskinan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan yaitu aksesibilitas dan penduduk.

D. Capaian kinerja sasaran 4

Capaian kinerja sasaran 4, diukur dengan 3 (Tiga) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada sasaran 4 (Empat) ini lebih kepada Menurunkan kawasan lingkungan yang tidak layak huni. Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 4 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4
Tahun 2018

Sasaran Strategis 4				
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman dan Perumahan yang Layak				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	67%	45,63%	68,10%	Kurang Baik
Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%	30%	29%	96,6%	Baik
Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	52%	50,83%	97,75%	Baik

➤ Indikator “**Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan**”

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan merupakan target MDG’S Provinsi Jambi. Bila dibandingkan dengan target Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan yang tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja 2016 realisasi Proporsi rumah dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan pada tahun 2018 kami menampilkan realisasi pada tahun 2017 sama dengan data BPS susenas pada tahun 2018 yaitu 47,57 persen. Sampai dengan tahun 2018, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan rata rata mencapainya **Cukup Baik** sekitar 71 persen dari target 67% yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2016-2021.

Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta serta penduduk yang telah mengerti tentang penggunaan sanitasi yang layak. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan yaitu aksesibilitas dan penyuluhan kepada

masyarakat. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 merupakan dana APBN dan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

➤ Indikator “**Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%**”

$$\frac{\text{Persentase pengurangan Luas kaw.kumuh}}{\text{Luas kaw.kumuh}} = \frac{\text{Luas kawasan kumuh yang ditangani (ha)}}{\text{Total luasan kawasan kumuh Provinsi (ha)}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Persentase pengurangan Luas kaw.kumuh}}{\text{Luas kaw.kumuh}} = 1357,64 \text{ ha} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Persentase pengurangan Luas kaw.kumuh}}{\text{Luas kaw.kumuh}} =$$

Persentase rumah kumuh di perkotaan merupakan target MDG’S provinsi jambi. Bila dibandingkan dengan target, rata-rata persentase pengurangan luas kawasan kumuh **Sangat Baik** dengan rata-rata capaiannya 116 persen yaitu 29 persen dari target 25 persen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja 2016. Langkah yang perlu diperhatikan dalam pengurangan luas kawasan kumuh tersebut, yaitu :

1. Pemerintah harus mampu mengurangi rumah tangga kumuh di perkotaan maupun di perdesan
2. Peranan masyarakat harus ditingkatkan melalui kegiatan – kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong dan lain – lain sebagainya.

➤ Indikator “**Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat**”

$$\frac{\text{Persentase tersedianya lingkungan Layak huni (PSU) bagi masyarakat}}{\text{Layak huni (PSU) bagi masyarakat}} = \frac{\text{Panjang PSU layak huni yang dicapai (km)}}{\text{Total Panjang PSU yang ditangani (km)}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Persentase tersedianya lingkungan Layak huni (PSU) bagi masyarakat}}{\text{Layak huni (PSU) bagi masyarakat}} = \frac{8,56 \text{ km}}{37,3 \text{ km}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Persentase tersedianya lingkungan Layak huni (PSU) bagi masyarakat}}{\text{Layak huni (PSU) bagi masyarakat}} = 22.94\%$$

Persentase tersedianya lingkungan layak huni di ambil sampel penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas (PSU) yang tersedia dengan layak, pengaruh dan sangat signifikan terhadap kualitas hidup hunian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Rata-rata 63,72 persen persentase capaian kinerja tersebut diatas masih **Tidak Baik** atau hanya 22.94 persen dari target 36 persen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Maksud tidak baik disini bukannya tidak tercapai target, hanya saja dipertengahan tahun terjadi rasionalisasi anggaran tahun 2018, sehingga mempengaruhi capaian target kinerja Renstra di tahun 2018 ini. Persentase peningkatan lingkungan layak huni tersebut ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan ketersediaan PSU bagi masyarakat yang layak dihuni atau dinikmati.

Adapun faktor yang mempengaruhi Persentase peningkatan hunian layak bagi masyarakat yaitu :

1. Dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta
2. Tingkat kemiskinan
3. Pertumbuhan ekonomi

Langkah yang perlu diperhatikan dalam peningkatan hunian layak bagi masyarakat yaitu ketersediaan prasarana umum hingga ke pelosok daerah, koordinasi antara pemerintah dan swasta (CSR), dan perlu adanya peraturan daerah terhadap kegiatan cooperate social responsibility (CSR) di Provinsi Jambi. Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada peningkatan hunian layak bagi masyarakat, melalui program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman dengan kegiatan Pembangunan PSU Perumahan Formal.

III.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

A. Alokasi Anggaran Tahun 2018

Penanganan infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan salah satu urusan wajib prioritas dalam kebijakan pembangunan Provinsi Jambi yang menjadi bagian penopang utama atau pendukung dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Perhatian ini telah dinyatakan sebagai salah satu prioritas utama dalam RPJMD

Provinsi Jambi tahun 2016-2021, serta terlihat jelas dalam pengalokasian anggaran daerah, dimana porsi terbesar memang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pekerjaan Umum. Selama tahun 2018, alokasi anggaran untuk urusan wajib bidang pekerjaan umum mengalami perubahan anggaran yang sebelumnya (APBD murni) senilai **Rp 829.666.977.900,-** menjadi (APBD-Perubahan) senilai **Rp.787.987.310.900,-** Dari alokasi tersebut terjadi rasionalisasi anggaran senilai Rp.41.679.667.000,- (3,79%) dan telah terealisasi keuangan sebesar **Rp.821.691.000.629,- (Keu : 93,85% dan Fisik : 96,49%)**. Pengalokasian program/kegiatan anggaran tersebut dibagi sesuai tupoksi bidang/bagiannya masing-masing, rinciannya antara lain :

➤ **Bagian Sekretariat**

Bagian sekretariat merupakan bagian induk dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat rutin ke-PU-an pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Pada bagian ini urusan wajib pemerintahan melingkupi 5 (lima) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan rutin dengan total alokasi anggaran perubahan sebesar **Rp.10.324.425.700,- atau 1,31%** dari total anggaran perubahan Dinas PU Provinsi Jambi.

➤ **Bidang Sumber Daya Air (SDA)**

Bidang Sumber Daya Air merupakan bidang pendukung infrastruktur Provinsi Jambi, dimana program/kegiatannya lebih berprioritas pada akses pendukung ketahanan pangan. Bidang ini lebih menitik beratkan pada program/kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong, pengembangan/pengelolaan jaringan irigasi dan rawa, penyediaan dan pengelolaan air baku, serta pengendalian terhadap banjir melalui normalisasi air sungai. Pada bidang ini urusan wajib pemerintahan melingkupi 4 (Empat) program dan 16 (Enam belas) kegiatan dengan total alokasi Anggaran perubahan sebesar **Rp. 75.257.355.000,- atau 9.55%** dari total anggaran perubahan Dinas PU Provinsi Jambi.

➤ **Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga merupakan bidang pendukung infrastruktur Provinsi Jambi, dimana program/kegiatannya lebih berprioritas pada akses pembangunan jalan dan jembatan serta rehabilitasi/pemeliharaannya. Pada bidang ini urusan wajib pemerintahan dalam penyediaan alokasi anggaran APBD untuk Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi Jambi lebih besar dibandingkan bidang pendukung lainnya, melingkupi 1 (Satu) program dan 15 (lima belas) kegiatan dengan total alokasi anggaran perubahan sebesar **Rp.567.483.090.000,- atau 72.02%** dari total anggaran perubahan Dinas PU Provinsi Jambi.

➤ **Bidang Cipta Karya**

Bidang Cipta Karya merupakan bidang pendukung infrastruktur Provinsi Jambi, dimana program/kegiatannya lebih berprioritas pada akses penanganan kondisi kumuh melalui program/kegiatan penyediaan jaringan air bersih/air minum saluraran perpipaan primer dan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong untuk pencapaian RPJMD 2016-2020. Pada bidang ini urusan wajib pemerintahan melingkupi 3 (Tiga) program dan 8 (Delapan) kegiatan dengan total alokasi Anggaran perubahan sebesar **Rp. 69.408.053.000,- atau 8.81%** dari total anggaran perubahan Dinas PU Provinsi Jambi.

➤ **Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan merupakan bidang pendukung infrastruktur Provinsi Jambi, dimana program/kegiatannya lebih berprioritas pada akses penanganan kondisi kumuh dan penyediaan hunian yang layak huni menjadi IKU (indikator Kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam RPJMD dan Renstra 2016-2020. Melalui program/kegiatan pengembangan perumahan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Pada bidang ini urusan wajib pemerintahan melingkupi 4 (Empat) program dan 7 (Tujuh) kegiatan dengan total alokasi anggaran perubahan sebesar **Rp. 19.959.000.000,- atau 2,53%** dari total anggaran perubahan Dinas PU Provinsi Jambi.

➤ **Bidang UPTD- Alkal**

UPTD alat alat berat dan perbekalan (ALKAL) merupakan bidang pendukung kebinamargaan dalam pelaksanaan infrastruktur Provinsi Jambi, dimana program/kegiatannya lebih berprioritas pada akses penanganan rutin dan rusak berat akibat bencana alam melalui program/kegiatan nya optimalisasi penggunaan alat berat. Pada bidang ini urusan wajib pemerintahan melingkupi 1 (satu) program dan 7 (Tujuh) kegiatan dengan total alokasi Anggaran perubahan

sebesar **Rp. 20.107.288.700,-** atau **2,55%** dari total anggaran perubahan Dinas PU Provinsi Jambi.

➤ **Bidang UPTD – Balai Pengujian**

UPTD Balai Pengujian merupakan bidang pendukung dalam pelaksanaan infrastruktur Provinsi Jambi, dimana program/kegiatannya lebih berprioritas pada penyediaan sampel alat ukur dan bahan laboratorium. Melalui program/kegiatan nya pengadaan dan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium. Pada bidang ini urusan wajib pemerintahan melingkupi 1 (satu) program dan 3 (Tiga) kegiatan dengan total alokasi Anggaran perubahan sebesar **Rp. 2.575.330.000,-** atau **0,33%** dari total anggaran perubahan Dinas PU Provinsi Jambi.

➤ **Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian**

Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian merupakan bidang pendukung dalam pelaksanaan infrastruktur Provinsi Jambi, dimana program/kegiatannya lebih berprioritas pada pelatihan/ pembekalan bagi tenaga kerja konstruksi sehingga mereka memperoleh keterampilan dengan tersertifikasi sesuai dengan tingkat keahliannya masing – masing, melalui program/kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan jasa konstruksi.

Pada bidang ini urusan wajib pemerintahan melingkupi 5 (Lima) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan dengan total alokasi Anggaran perubahan sebesar **Rp. 4.071.768.500,-** atau **0,52%** dari total anggaran perubahan Dinas PU Provinsi Jambi.

➤ **Bidang Tata Ruang dan Pertanahan**

Bidang BinteK merupakan bidang pendukung dalam pelaksanaan infrastruktur Provinsi Jambi, dimana program/kegiatannya lebih berprioritas pada pengendalian dan pemanfaatan ruang Provinsi Jambi, melalui program/kegiatan nya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, peningkatan sarpras kebinamargaan, dan penataan ruang. Pada bidang ini urusan wajib pemerintahan melingkupi 3(Tiga) program dan 4 (Empat) kegiatan dengan total alokasi Anggaran perubahan sebesar **Rp. 18.801.000.000,-** atau **2,39%** dari total anggaran perubahan Dinas PU Provinsi Jambi.

B. Realisasi Anggaran 2018

Adapun target-target sebagai indikator dalam mendukung kelancaran dalam mencapai program dan kegiatan sektor infrastruktur telah dialokasikan anggaran nya sebagai wadah dalam pelaksanaan program/kegiatan, sebagai berikut :

➤ **Bagian Sekretariat**

Dari alokasi anggaran Tahun Anggaran 2018 bagian sekretariat sebesar Rp. 120.324.425.700,- yang terserap atau Rp.9.646.636.868 (**keu.93,44%**) dengan kondisi **fisik 99,57%**. Rincian persentase serapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.11
Capaian Program/Kegiatan Bagian Sekretariat
(Keuangan dan Fisik)
Tahun 2018

No	Kegiatan	Dana Dalam DPPA	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (1.03.01.01.01)	15.000.000	100,00	86,18
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Retribusi / Sewa (1.03.01.01.02)	898.100.000	100,00	82,61
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (1.03.01.01.07)	715.629.400	93,76	93,76
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (1.03.01.01.08)	926.800.000	100,00	98,65
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (1.03.01.01.10)	146.484.100	100,00	100,00
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (1.03.01.01.11)	131.727.500	100,00	100,00
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1.03.01.01.12)	123.600.000	100,00	99,92
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan (1.03.01.01.15)	93.000.000	100,00	99,88
9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (1.03.01.01.17)	158.600.000	100,00	100,00

10	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (1.03.01.01.18)	553.600.000	100,00	92,41
11	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (1.03.01.02.05)	370.000.000	100,00	100,00
12	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (1.03.01.02.09)	719.700.000	100,00	92,90
13	Kegiatan Pengadaan Komputer (1.03.01.02.11)	325.400.000	100,00	97,85
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (1.03.01.02.22)	1.631.000.000	100,00	95,10
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (1.03.01.02.24)	840.469.000	100,00	91,91
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (1.03.01.02.28)	239.600.000	100,00	98,96
17	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (1.03.01.03.02)	208.200.000	100,00	98,53
18	Kegiatan Diklat Pelatihan Formal dan Sosialisasi Bidang ke PU an (1.03.01.05.01)	189.069.250	100,00	83,51
19	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Infrastruktur Bidang ke PU an Prov.Jambi (1.03.01.05.04)	337.554.200	100,00	93,54
20	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (1.03.01.06.01)	117.720.000	100,00	99,89
21	Kegiatan Penyusunan Harga Dasar Satuan Upah, Bahan dan Alat (1.03.01.06.07)	140.492.750	100,00	99,02
22	Kegiatan Pengelolaan Aset Dinas PUPR Provinsi Jambi (1.03.01.06.08)	266.164.000	100,00	75,34
23	Kegiatan Pelayanan Informasi Komunikasi Kehumasan (1.03.01.06.09)	995.620.000	100,00	92,17
24	Kegiatan Penyusunan Program Rencana Umum dan Strategis Bidang Infrastruktur (1.03.01.06.10)	180.895.500	100,00	94,17

➤ **Bidang Bina Marga**

Bina Marga bertanggung jawab terhadap implementasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang bertujuan meningkatkan arus barang dan jasa serta mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah melalui program peningkatan jalan dan jembatan. Pendistribusian kegiatannya berdasarkan pendekatan kewilayahan (Wilayah Timur sampai Wilayah Barat Provinsi Jambi), khususnya ke sentra-sentra produksi melalui kegiatan-kegiatan berbentuk Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan rutin jalan di Provinsi Jambi yang menjadi kewenangan provinsi sepanjang 1.129,905 km (SK.Mentri PUPR No: 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015) dengan alokasi dana sebesar **Rp.609.687.363.569,-**. Hal tersebut berupaya untuk mencapai target kondisi jalan mantap sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini. Dari alokasi anggaran bidang bina marga sebesar Rp. 609.687.363.569,- yang terserap atau Rp.571.876.067.281,- (**keu.93,80%**) dengan kondisi **fisik 96,07%**. Rincian persentase serapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.12
Capaian Program/Kegiatan Bidang Bina Marga
(Keuangan dan Fisik)
Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (stlh Perubahan)	Realisasi (%)	
			Keuangan	Fisik
1	2	3	4	5
VI	Program pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan			
1	Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi)	11,290,033,000	93,84	99,49
2	Kegiatan Peningkatan jalan di wilayah I (Kab. Tanjab Barat)	60,207,527,000	93.31	95.57
3	Kegiatan Peningkatan Jalan di wilayah II (Kab. Tanjab Timur)	41,994,228,000	96.39	99.99
4	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo)	17,685,515,000	98.16	100
5	Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kab. Merangin dan Kerinci	51,672,080,100	61.48	65.72
6	Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kab. Tanjab Barat dan Kab.Tanjab Timur	21,878,829,000	96.86	100

7	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Ma. Jambi)	51,310,686,000	96.43	99.99
8	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin)	47,172,596,000	98.04	99.68
9	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci)	58,170,679,000	98.11	100
10	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VIII (Kab. Sarolangun)	51,622,016,000	98.07	100
11	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo)	33 58,819,870,000	97.45	100
12	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv.)	20,064,717,000	88.26	85.07
13	Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	50,297,266,000	98.29	99.95
14	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Ma. Jambi)	22,622,333,000	97.55	99.99

Salah satu prioritas penanganan infrastruktur jalan adalah membuka keterisolasian wilayah-wilayah produksi pertanian utama yang berada di wilayah Barat dan Timur Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga bertujuan secara tidak langsung untuk mengurai kemandegan (*bottlenecking*) yang selama ini dianggap menjadi faktor utama rendahnya Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi dan fluktuasi inflasi perdesaan. Selain itu juga pembebasan lahan untuk wilayah barat dan timur sebagai tujuan akses pelabuhan ujung jabung dan Bandara Sultan Thaha Jambi, serta menjadi prioritas RPJPD dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 5 (lima) tahun (2016-2020) kedepannya.

➤ **Sumber Daya Air**

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan target terpeliharanya bendung, saluran pembawa dan pembuang serta bangunan pelengkap lainnya untuk memberikan jaminan pelayanan terhadap lahan irigasi seluas 6.029 Ha (Permen PUPR No.04/PRT/M/2015 tanggal 18 maret 2015 tentang criteria dan penetapan wilayah sungai) pada wilayah-wilayah produksi utama di Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak peningkatan produktivitas sektor pertanian dan kepada masyarakat luas secara umum. Oleh karena itu, pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya lebih diarahkan pada kegiatan rehabilitasi daerah irigasi, bendung dan operasional dan pemeliharaan Daerah Irigasi serta pengawasan pekerjaan. Pelaksanaan kegiatan juga dilaksanakan pada beberapa Kabupaten/Kota terutama pada wilayah-wilayah potensi sumberdaya

pertanian secara luas. Dari alokasi anggaran perubahan bidang sumber daya air (SDA) sebesar Rp. 98.724.089.100 yang terserap atau Rp. 97.579.274.402 (**keu.98.84%**) dengan kondisi **fisik 99,45%**. Rincian persentase serapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.13
Capaian Program/Kegiatan Bidang SDA
(Keuangan dan Fisik)
Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (stlh Perubahan)	Realisasi (%)	
			Keuangan	Fisik
1	2	4	5	6
IX	Program Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir, dan Pengaman Pantai			
1	Kegiatan Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	1,554,315,000	99.96	99.96
2	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Wilayah I	11,455,925,000	99.93	99.95
3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Wilayah II	10,274,067,000	94.92	99.96
4	Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai	11,309,655,000	99.9	99.97
XI	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			
5	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	618,848,500	99.93	99.89
6	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	7,003,713,900	99.86	99.96
7	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Baru	3,568,251,400	99.8	99.9
8	Kegiatan Rehabilitasi/Reklamasi Jaringan Rawa	22,269,880,000	99.86	99.96
XIII	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku			
9	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyediaan Sumber Air Baku	9,175,641,000	97.42	99.91
10	Kegiatan Rehabilitasi / Reklamasi Jaringan Rawa (DAK)	6,286,469,700	99.86	99.96
11	Kegiatan Perencanaan pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lainnya	1,611,273,000	97.12	97.12
XXII	Program Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA			
1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi yang telah di Bangun	2,471,280,700	99.65	99.66
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa yang telah dibangun	3,860,616,300	99.9	99.9
3	Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	119,490,700	98.8	99.13
XXIII	Program Kualitas Pengelolaan SDA terpadu			

1	Pengelolaan Sumber Daya Air	543,224,900	98.96	99.32
2	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Bidang SDA	1,061,437,000	93.18	93.18

➤ Cipta Karya

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di berbagai aspek kehidupan dan kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi, diperlukan upaya peningkatan, pengembangan dan penyediaan kebutuhan dasar (*basic needs*) wilayah. Kebutuhan dasar tersebut berupa infrastruktur yang memadai, sehingga secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan semakin memadainya sarana dan prasarana, diharapkan akan mampu bermanfaat luas terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Pada tahun 2018 Bidang Cipta Karya mendapat alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 69.408.053.000 ,- dengan serapan sebesar Rp.24.877.151.789,-(**keu. 35.84%**) dengan kondisi **fisik 39.30%**. untuk mencapai target *Millenium Development Goals (MDG's)*, dimana yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) / target RPJMD 2016-2021 capainya lebih pada kegiatan penanganan pembangunan jaringan air bersih / air minum layak sebesar 99,97% pada program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan pengairan lainnya.

Tabel III.14
Capaian Program/Kegiatan Bidang Cipta Karya
(Keuangan dan Fisik)
Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (setelah Perubahan)	Realisasi (%)	
			Keuangan	Fisik
1	2	4	5	6
1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	797.120.203	12.32	12.32
2	Kegiatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	17.815.871.500	38.02	41.02
3	Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya	4.487.886.854	79.26	93.99
4	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Bidang Cipta Karya	3.173.949.600	29.87	39.67
5	Kegiatan Penyediaan, Pengelolaan air minum dan distribusi jaringan air bersih	12.014.545.193	2.81	2.82
6	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	59.356.750	86.76	86.76
7	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	29.302.915.500	44.23	47.00
8	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase sekunder/gorong-gorong	1.756.407.400	13.12	13.29

➤ **Perumahan**

Lingkungan layak huni bagi masyarakat menjadi prioritas selama RPJMD tahap ke-3 ini tahun 2016-2021 dan IKU pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi 2016-2021 ini. Penanganan urusan perumahan rakyat, merupakan salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, estetik dan nyaman. Penanganan urusan ini mencakup peningkatan kualitas permukiman dan perumahan beserta utilitasnya, terutama di daerah perkotaan. Perwujudan permukiman yang teratur dan tertata rapi, merupakan dambaan masyarakat dan pemerintah. Dari alokasi anggaran bidang perumahan sebesar Rp.19.959.000.000 yang terserap atau Rp.18.177.501.789 (**keu.91.07%**) dengan kondisi **fisik 98.07%**. Rincian persentase serapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.15
Capaian Program/Kegiatan Bidang Perumahan
(Keuangan dan Fisik)
Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (stlh Perubahan)	Realisasi (%)	
			Keuangan	Fisik
1	2	3	4	5
	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman			
1	Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Bidang Perumahan	1.526.000.300	96.30	99.33
2	Pembangunan PSU Perumahan Formal	6.488.073.876	88.26	99.20
3	Pembangunan PSU Perumahan Swadaya	10.337.506.762	93.62	99.50
4	Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan	559.968.562	91.12	91.12
5	Kegiatan Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bidang Perumahan	1.035.570.500	75.74	75.98

➤ **UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan**

Dari alokasi anggaran perubahan bidang UPTD Alkal sebesar Rp.20.107.288.700 yang terserap atau Rp.17.441.076.756 (**keu.86.74%**) dengan kondisi **fisik 86.74%**. Rincian persentase serapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.16
Capaian Program/Kegiatan UPTD Alkal
(Keuangan dan Fisik)
Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (stlh Perubahan)	Realisasi (%)	
			Keuangan	Fisik
1	2	4	5	6
I	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur ke-PU-an			
1	Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat	2.061.735.000	0.50	0.50
2	Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan Penggunaan Alat-alat Berat	427.022.000	94.58	94.58
3	Ketatausahaan	1.503.726.000	87.49	87.49
4	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	2.604.824.000	95.22	95.22
5	Kegiatan Operasional Alat Berat untuk Pekerjaan Infrastruktur ke-PU-an	4.621.335.000	98.42	98.42
6	Pengelolaan Logistik dan Perbekalan	671.608.000	69.35	69.35
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Penanganan Kritis Jalan provinsi	8.217.038.700	100	100

➤ **UPTD Balai Pengujian (Urusan Pekerjaan Umum)**

Dalam usaha terwujudnya mutu pembangunan prasarana fisik bidang ke PU an (jalan, jembatan, gedung, pengairan dan bedungan) UPTD Balai Pengujian yang telah terAkreditasi sebagai laboratorium penguji (LP-612- IDN) terus melakukan Peningkatan Kompetensi Bidang Pengujian dengan mengikuti Pelaksanaan Uji Profisiensi sebagai bagian dari pembinaan laboratorium.

Program uji profisiensi merupakan salah satu bentuk jaminan mutu hasil pengujian selain penggunaan bahan acuan bersertifikat sehingga hasil dari uji profisiensi ini nantinya dapat digunakan sebagai salah satu kegiatan jaminan mutu (keakurat hasil uji) bagi masing-masing laboratorium peserta yang ikut dalam kegiatan uji profisiensi ini. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium mendukung infrastruktur ke-PU-an bertujuan untuk meningkatkan kinerja hasil pemeriksaan / pengujian, baik dari jumlah maupun dari kualitas hasil pengujian.

Dari alokasi anggaran bidang UPTD Pengujian sebesar Rp.2.575.330.000 yang terserap atau Rp.2.230.418.382 (**keu.86.61%**) dengan kondisi **fisik 86.74%**. Rincian persentase serapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.17
Capaian Program/Kegiatan UPTD Balai Pengujian
(Keuangan dan Fisik)
Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (setelah Perubahan)	Realisasi (%)	
			Keuangan	Fisik
1	2	4	5	6
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur ke-PU-an			
1	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan Penunjang Laboratorium ke-PU-an	1.194.354.500	78.97	80.09
2	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium ke-PU-an	663.040.000	86.67	89.03
3	Kegiatan Peningkatan peran dan fungsi Labortarium Uji Bidang ke-PU-an	717.935.500	99,25	100

Terdapat beberapa kendala dalam upaya mengoptimalkan mutu pelaksanaan pembangunan fisik bidang jalan terkait masih sangat minimnya peralatan dan bahan untuk menunjang pengujian dan pemeliharaan terhadap alat-alat pengujian.

➤ **Bina Konstruksi dan Pengendalian**

Dari alokasi anggaran Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian sebesar Rp.4.071.768.500 yang terserap atau Rp.3.974.701.834 (**keu.97.62%**) dengan kondisi **fisik 99.82%**. Rincian persentase serapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.18
Capaian Program/Kegiatan UPTD Jasa Konstruksi
(Keuangan dan Fisik)
Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (stlh Perubahan)	Realisasi (%)	
			Keuangan	Fisik
1	2	4	5	6
1	Kegiatan Pembinaan Teknik Sumber Daya Aparatur Bidang ke-PU-an	308.964.200	98.54	99.67
2	Kegiatan Pembinaan Aparatur dan SDM Jasa Konstruksi	168.200.500	99.77	100
3	Kegiatan Penilaian Kinerja Jasa Konstruksi dan SIPJAKI	390.510.100	98.26	98.39
4	Kegiatan Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan serta penguatan NSPM dan Pengembangan Data Infrstruktur Bidang ke-PU-an	599.228.350	94.05	100

5	Kegiatan Pemberdayaan Kemitraan dan Peningkatan Peran TPJK dan FJKD	197.656.000	96.27	100
6	Kegiatan Pelatihan, Pembekalan, dan fasilitasi Uji Kompetensi TKK	1.271.184.700	99.33	100
7	Kegiatan Bintek Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Konstruksi	311.005.900	99.36	100
8	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	103.234.050	98.09	100
9	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Infrastruktur	721.784.700	95.78	100

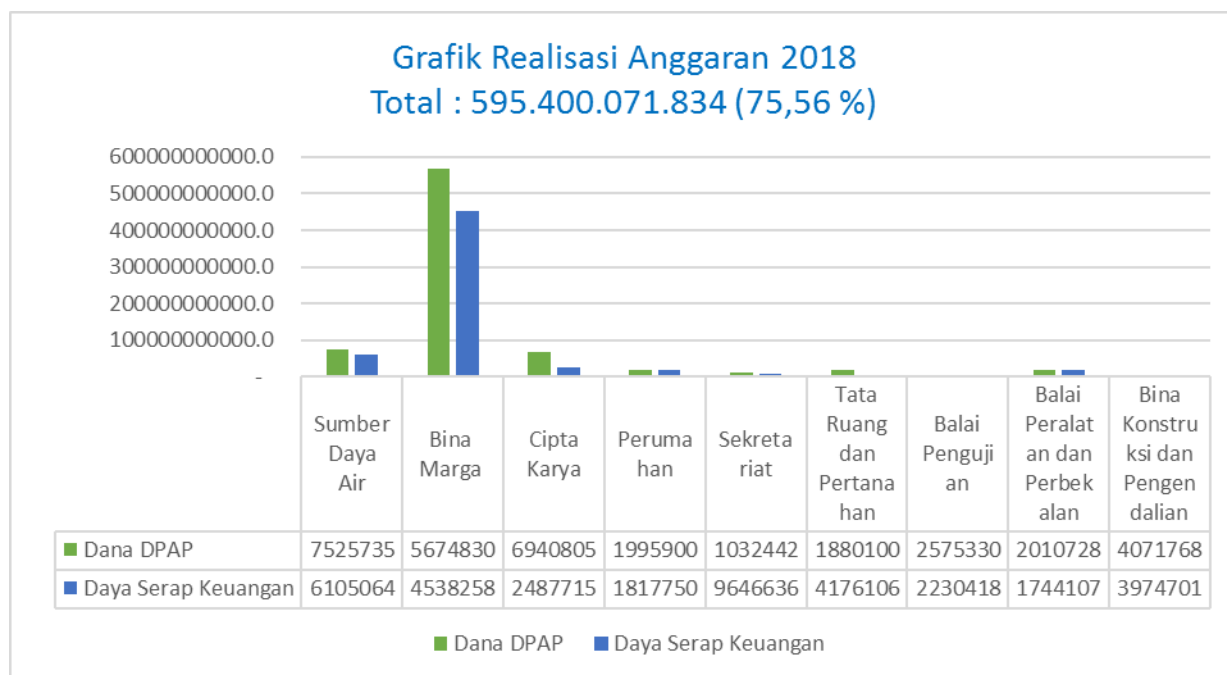
➤ Tata Ruang dan Pertanahan

Dari alokasi anggaran Bidang Bidang Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp.13.106.231.200 yang terserap **Keuangan 30.47 %** dengan kondisi **fisik 64.02%**. Rincian persentase serapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

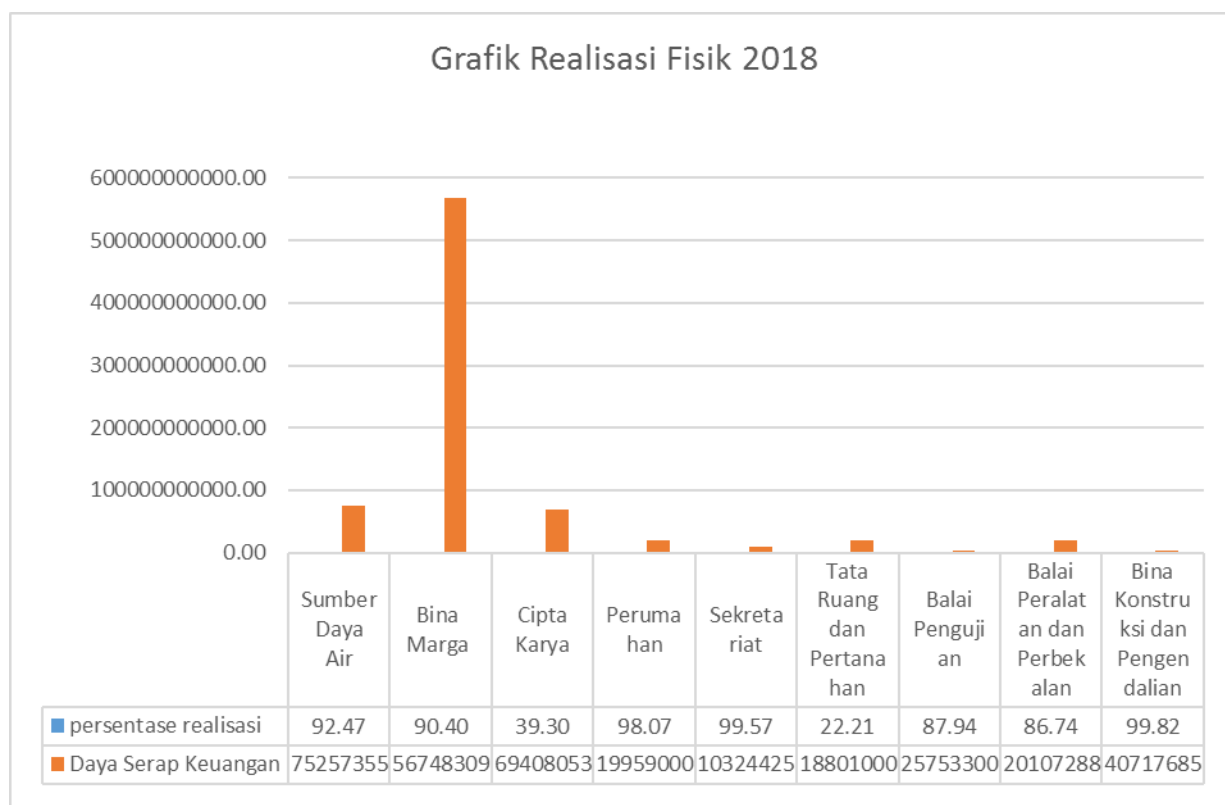
Tabel III.19
Capaian Program/Kegiatan Bidang Bina Teknik dan Tata Ruang
(Keuangan dan Fisik)
Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (stlh Perubahan)	Realisasi (%)	
			Keuangan	Fisik
1	2	4	5	6
1	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterpaduan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	291.447.100	97.88	100
2	Kegiatan Pengadaan tanah untuk Bangunan jalan dan Jembatan Provinsi Jambi	15.050.680.100	10.95	21.94
3	Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	711.446.200	37.92	41.11
4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	450.000.000	98.10	100
5	Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pemrograman, dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	2.295.000.000	66.76	71.40

Grafik III.1
DISTRIBUSI ANGGARAN MURNI DPA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI
TA.2018



Grafik III.2
REALISASI (KEUANGAN) PROGRAM/KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI
TA.2018



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) merupakan manifestasi dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Gubernur Jambi No. 7 Tahun 2000. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. yang menjadi panduan untuk menyajikan informasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2018.

Secara Umum dari Misi yang telah ditetapkan sebanyak 4 (Empat) misi dalam penetapan kinerja telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang diharapkan. Keberhasilan ini juga telah didukung penuh oleh seluruh anggota organisasi. Walaupun secara umum Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi telah cukup berhasil, tidak berarti tidak ada permasalahan. Permasalahan yang paling mendasar adalah setiap pelaksanaan anggaran baik itu APBD maupun APBN pastinya menghadapi permasalahan baik itu dari segi pendanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pekerjaannya. Hal tersebut menjadikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi untuk lebih berkarya dan lebih maju lagi terutama di sektor infrastruktur.

a. Pendanaan

Dari segi pendanaan anggaran alokasi APBD 2018 masih tergolong minim untuk pelaksanaan implementasi di lapangan sektor infrastruktur. Salah satunya contohnya infrastruktur di bidang Bina Marga, dalam pencapaian target untuk kondisi jalan mantap saja dapat diprediksikan kebutuhan anggaran yang diperlukan bisa 2x lipat dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2018 ini. Hal tersebut demi menunjang pencapaian kondisi jalan mantap target RPJMD dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021 kedepan. Namun permasalahan tersebut bukanlah menjadi kondisi yang sulit dalam pengembangan infrastruktur didalamnya. Dengan kondisi yang ada tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selalu berbenah dan tetap menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan infrastruktur Provinsi Jambi ke depannya. Setelah ditetapkannya melalui Surat Keputusan Penetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015 lalu, dimana panjang jalan provinsi yang sebelumnya 1.504,93 km menjadi 1.129,905 km, sesilish diantaranya sepanjang 375,025 km ruas jalan provinsi tersebut di Provinsi Jambi dinaikan statusnya menjadi jalan nasional. Hal tersebut sangat membantu permasalahan minimnya penyediaan anggaran yang dimaksud.

b. Pelaksanaan pekerjaan

Antisipasi permasalahan pada tahun yang akan datang, salah satunya dengan melaksanakan pelelangan paket-paket pekerjaan yang lebih dipercepat untuk memberikan ruang dan waktu perencanaan terhadap implementasi pekerjaan yang lebih baik.

c. Perencanaan dan pengawasan pekerjaan

Perlunya koordinir perencanaan maupun pengawasan yang lebih terkoordinir, sehingga hasil perencanaan sesuai harapan dan pengawasannya pun terkontrol baik menjadi satu paket pekerjaan

Untuk lebih mengefektifkan pencapaian sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi secara optimal, langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

- Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait,
- Diperlukan perencanaan yang lebih matang sesuai dengan tingkat kebutuhan terutama dalam estimasi material untuk mengantisipasi jika terjadi kelangkaan distribusi material tertentu serta pengawasan teknis yang mengacu pada pengendalian mutu dan kualitas kerja,
- Perencanaan Program yang mengacu pada skala prioritas dan mengoptimalkan dana yang ada pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan penanganan segera,
- Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan di lapangan serta mengupayakan sumber dana lain diluar APBD dan APBN,
- Melakukan pembenahan dan penataan aset di bidang infrastruktur.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan H. Agus Salim No. 2 Kota Baru
Telp. (0741) 446720, 446726, 42669, 41225, 445115, Fax. (0741) 446721, 446726
JAMBI 36137

Jambi, 21 Januari 2019

Kepada

Nomor : S- 156/DPUPR-1.2/1/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Data Pelaksanaan
Kegiatan GERMAS Tahun 2018

Yth. Kepala Bappeda
cq. Kepala Bidang Sosial dan
Budaya Provinsi Jambi
di


Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Bappeda Daerah Provinsi Jambi Nomor : S-0150/BAPPEDA-3.3/1/2019 Tanggal 07 Januari 2019 Perihal Permintaan Data Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Tahun 2018 , bersama ini disampaikan dokumen dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Kepala Dinas,

23/1-19
Yth. YP.


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19640304 199203 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DIAN MARTIYOSA, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Tata Ruang Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. EDY FERNANDO, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019


Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
TATA RUANG DAN PERTANAHAN


Ir. EDY FERNANDO
Pembina (IV/b)
NIP. 19650208 199503 1 001

Pihak Pertama,

KASI TATA RUANG


DIAN MARTIYOSA, ST
Penata (III/c)
NIP. 19820315 200804 1 002

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Tata Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	1. Jumlah dokumen/laporan Penyusunan dokumen rencana umum dan strategis potensi pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan yang dikeluarkan	1 Dok/Lap
		2. Jumlah dokumen/laporan fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan pemograman dan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan yang dikeluarkan	1 Dok/Lap
		3. Jumlah dokumen/laporan pengelolaan informasi infrastruktur wilayah bidang ke-PU-an yang dikeluarkan	1 Dok/Lap
		4. Jumlah dokumen/laporan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan	9 Dok/Lap

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

I. Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Rp. 3.654.706.850,00
1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan	Rp. 454.379.000,00
2. kegiatan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan	Rp. 546.822.150,00
3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pemograman, dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Rp. 2.653.505.700,00

Jambi , Januari 2019

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas PUPR Provinsi Jambi

Kasi Tata Ruang
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas PUPR Provinsi Jambi,


Ir. EDY FERNANDO

Pembin (IV/b)

19650208 199503 1 001


DIAN MARTIYOSA, ST

Penata (III/c)

NIP. 19820315 200804 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. HENDRY ERIADI, MM**
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Teknik Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. EDY FERNANDO, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG
TATA RUANG DAN PERTANAHAN**



Ir. EDY FERNANDO

Pembina (IV/a)
NIP. 19650208 199503 1 001

Pihak Pertama,

KASI PERENCANAAN TEKNIK



Ir. HENDRY ERIADI, MM

Pembina (IV/a)
NIP. 19630222 199203 1 003

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Perencanaan Teknik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	1. Jumlah dokumen/laporan monitoring dan evaluasi keterpaduan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan yang dikeluarkan	1 Dok/Lap

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

II. Program Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan

Rp. 432.408.300,00

1. Kegiatan Monitoring dan evaluasi keterpaduan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan


Rp. 432.408.300,00

Jambi , Januari 2019

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas PUPR Provinsi Jambi

Kasi Perencanaan Teknik
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas PUPR Provinsi Jambi,


Ir. EDY FERNANDO
Pembina (IV/a)
19650208 199503 1 001


Ir. HENDRI ERIADI, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19630222 199203 1 003

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	1. Jumlah lokasi yang dibebaskan untuk Jalan dan Jembatan	2 Lokasi

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

I. Program Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rp. 32.862.984.850,00


1. Kegiatan Pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan Provinsi Jambi


Rp. 32.862.984.850,00

Jambi , Januari 2019

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas PUPR Provinsi Jambi

Kasi Pertanahan
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas PUPR Provinsi Jambi,


Ir. EDY FERNANDO
Pembina (IV/a)
19650208 199503 1 001


MAHYURITA YELMI, ST
Penata (III/c)
NIP. 19810509 200501 2 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NOVIRIANI, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

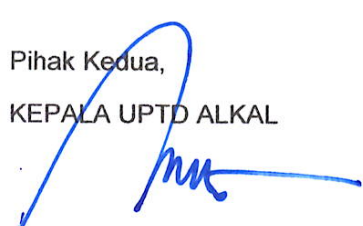
Nama : **SIGIT IRIANTA, S.IP. M.MTr**
Jabatan : Kepala UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan (ALKAL)
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

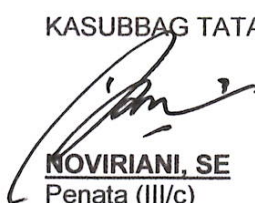
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD ALKAL


SIGIT IRIANTA, S.IP. M.MTr
Pembina (IV/a)
NIP. 19611230 198803 1 006

Jambi, Januari 2019

Pihak Pertama,
KASUBBAG TATA USAHA


NOVIRIANI, SE
Penata (III/c)
NIP. 19751115 199503 2 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Subbag Tata Usaha

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	1. Jumlah alat - alat berat yang direncanakan (Mobil dump truck)	2 unit
		2. Jumlah SDM ketatausahaan	64 orang
2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	3. Persyaratan Pelayanan	87%
		4. Prosedur Pelayanan	86%
		5. Waktu Pelayanan	82%
		6. Biaya/Tarif Pelayanan	84,50%
		7. Produk / Hasil Pelayanan	82%
		8. Kemampuan Petugas Pelayanan	82,50%
		9. Perilaku Petugas Pelayanan	84%
		10. maklumat Pelayanan	84%
		11. Mekanisme Pengaduan Pelayanan	87,50%

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur ke-PU-an

1. Kegiatan Pengadaan Alat-alat berat
2. Kegiatan Ketatausahaan

Rp. 2.479.372.000,00

Rp. 815.844.000,00

Rp. 1.663.528.000,00

Jambi , Januari 2019

Kepala UPTD ALKAL
Balai Peralatan dan Perbekalan
Dinas PUPR Provinsi Jambi,

SIGIT IRIANTA, S.IP, MMTr

Pembina (IV/a)

NIP. 19621230 198803 1 016

Kasubbag Tata Usaha
UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan
Dinas PUPR Provinsi Jambi,

NOVIRIANI, SE

Penata (III/c)

NIP. 19751115 199503 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **BUDI ISWANTO, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Teknik UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **SIGIT IRIANTA, S.IP. M.MTr**
Jabatan : Kepala UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan (ALKAL)
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

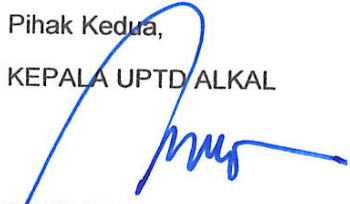
Selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

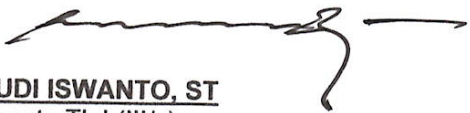
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD ALKAL


SIGIT IRIANTA, S.IP. M.MTr
Pembina (IV/a)
NIP. 19611230 198803 1 006

Pihak Pertama,
KASI PELAYANAN TEKNIK


BUDI ISWANTO, ST
Penata Tk.I (III/c)
NIP. 19741004 200701 1 005

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Pelayanan Teknik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	1. Jumlah laporan dokumen perencanaan, pengawasan dan pelaporan 2. Jumlah alat berat yang dipelihara/ direhab 3. Jumlah alat berat dan pendukung lainnya yang dioperasikan	24 Dok 57 unit 57 unit

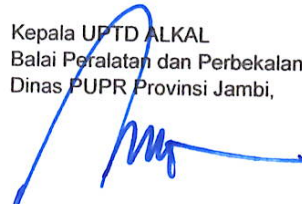
PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur ke-PU-an		Rp.	8.625.603.000,00
1. Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan Penggunaan Alat-alat Berat		Rp.	426.132.000,00
2. Kegiatan Rehab/Pemeliharaan alat - alat berat		Rp.	2.578.074.000,00
3. Kegiatan Penggunaan alat berat untuk pekerjaan infrastruktur ke-PU-an		Rp.	5.621.397.000,00

Jambi , Januari 2019

Kepala UPTD ALKAL
Balai Peralatan dan Perbekalan
Dinas PUPR Provinsi Jambi,


SIGIT IRIANTA, S.IP, MMTr
Pembina (IV/a)
NIP. 19621230 198803 1 016

Kasi Pelayanan Teknik
UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan
Dinas PUPR Provinsi Jambi,


BUDI ISWANTO, ST
Penata (III/c)
NIP. 19740829 200312 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **M. IWAN RAHMADI, ST. MT**
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Perbekalan UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **SIGIT IRIANTA, S.IP. M.MTR**
Jabatan : Kepala UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan (ALKAL)
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi


Selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD ALKAL


SIGIT IRIANTA, S.IP. M.MTr
Pembina (IV/a)
NIP. 19611230 198803 1 006

Pihak Pertama,
KASI PENGELOLAAN PERBEKALAN


M. IWAN RAHMADI, ST. MT
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19801021 200501 1 009

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Pengelolaan Perbekalan

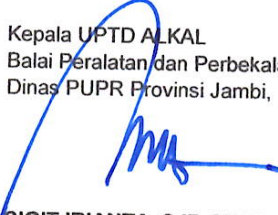
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	1. Jumlah logistik dan perbekalan yang dikelola 2. Panjang jalan provinsi (Fungsional) menuju sentra produksi yang dipelihara	57 unit 342 km

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN


I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur ke-PU-an	Rp.	11.196.595.000,00
1 Kegiatan Logistik dan Perbekalan	Rp.	699.373.000,00
2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Penanganan Kritis Jalan Provinsi	Rp.	10.497.222.000,00

Kepala UPTD ALKAL
Balai Peralatan dan Perbekalan
Dinas PUPR Provinsi Jambi,


SIGIT IRIANTA, S.IP, MMT
Pembina (IV/a)
NIP. 19621230 198803 1 016

Jambi, Januari 2019

Kasi Pengelolaan Perbekalan
UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan
Dinas PUPR Provinsi Jambi,


M. IWAN RAHMADI, ST. MM
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19801021 200501 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YENKI FEBRIDA, ST.,MT**
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT**
Jabatan : Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

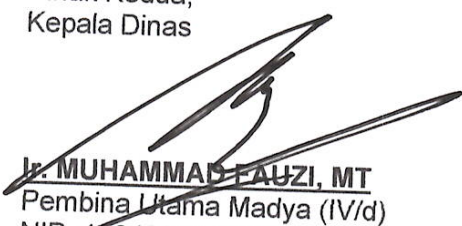
selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Dinas


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640304 199203 1 004

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT


YENKI FEBRIDA, ST.,MT
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690212 200003 1 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon III (Bidang Perumahan Rakyat)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	1. Persentase Tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	68%
		2. Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat	68%
		3. Persentase tercapainya Laporan yang dikeluarkan Monev bidang perumahan pada tahun berkenaan	100%
		4. Persentase tercapainya Laporan fasilitasi, bantuan teknis dan sosialisasi bidang perumahan pada tahun berkenaan.	100%

PROGRAM

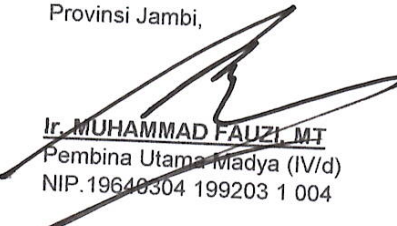
JUMLAH ANGGARAN

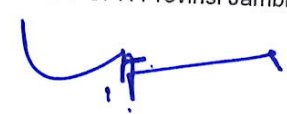
I.	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Rp.	1.321.703.800,00
II.	Program Pembangunan PSU Perumahan dan Permukiman di pusat kegiatan nasional dan kawasan strategis provinsi	Rp.	11.788.269.200,00
III.	Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan	Rp.	660.184.500,00
IV.	Program Fasilitasi, Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bid.Perumahan	Rp.	764.842.500,00
		Rp.	14.535.000.000,00

Jambi, Januari 2019

Kepala Dinas PUPR
Provinsi Jambi,

Kepala Bidang Perumahan Rakyat
Dinas PUPR Provinsi Jambi


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19640304 199203 1 004


YENKI FEBRIDA, ST., MT
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690212 200003 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hj. SEPRIO EMELDA, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Teknik Bidang Perumahan Rakyat
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **YENKI FEBRIDA, ST. MT**
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KABID.PERUMAHAN RAKYAT

YENKY FEBRIDA, ST. MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19690212 200003 1 001

Jambi, Januari 2019

Pihak Pertama,

KASI PERENCANAAN TEKNIK

Hj. SEPRIO EMELDA, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19771007 200212 2 007

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Perencanaan Teknik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	1. Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan yang dikeluarkan	16 Dok
		2. Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan bidang Perumahan yang dikeluarkan	2 Laporan

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

I. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

1. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Bidang Perumahan Rp. 1.321.703.800,00

II. Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan

1. Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan Rp. 660.184.500,00
Rp. 1.981.888.300,00

Jambi , Januari 2019

Kepala Bidang Perumahan Rakyat
Dinas PUPR Provinsi Jambi



YENGI FEBRIDA, ST., MT
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690212 200003 1 001

Kasi Perencanaan Teknik
Bidang Perumahan Rakyat
Dinas PUPR Provinsi Jambi,



Hj. SEPRIO EMELDA, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19771007 200212 2 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum**
Jabatan : Plt. Gubernur Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

Plt. GUBERNUR JAMBI

Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS
PUPR PROVINSI JAMBI**


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640304 199203 1 004

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	1 Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap	78.07%
2.	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	2 Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	80.00%
3.	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	3 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	70.00%
4.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	4 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	72.00%
		5 Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%	30.00%
		6 Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	65.00%
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	7 Indeks Kepuasan Masyarakat	85.00%

Jambi, Januari 2019

Pt. GUBERNUR JAMBI,

KEPALA DINAS PUPR PROVINSI JAMBI,

Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya
NIP.19640304 199203 1 004

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	1 Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap	78.07%
2	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	2 Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	80.00%
3.	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	3 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	70.00%
4.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	4 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	72.00%
		5 Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%	30.00%
		6 Persentase tersediannya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	65.00%
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	7 Indeks Kepuasan Masyarakat	85.00%

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
I. Program Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	510,020,622,850.00	
II. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	24,504,992,200.00	
III. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	42,693,128,100.00	
IV. Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	13,068,816,450.00	
V. Program Pembangunan PSU Perumahan dan Permukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi	11,788,269,200.00	
	602,075,828,800.00	

Jambi, Januari 2019

Plt. GUBERNUR JAMBI,

KEPALA DINAS PUPR PROVINSI JAMBI,

Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya
NIP.19640304 199203 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SUMARDI, BE**
Jabatan : Kepala Seksi Perumahan Formal dan Pembiayaan
Bidang Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **YENKI FEBRIDA, ST.,MT**
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

KABID.PERUMAHAN RAKYAT

YENKY FEBRIDA, ST.,MT

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19690212 200003 1 001

Pihak Pertama,

KASI PERUMAHAN FORMAL
DAN PEMBIAYAAN

SUMARDI, BE

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19620603 198207 1 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Perumahan Formal dan Pembiayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	1. Panjang jalan lingkungan PSU Perumahan formal yang dibangun sebagai sarana pendukung sepanjang 46,7km	6,7 km
		2. Jumlah rusun layak huni yang dibangun dan mengurangi backlog	- unit
		3. Jumlah rumah khusus (*apabila terjadi bencana alam) yang dibangun	- unit

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

**Program Pembangunan PSU Perumahan dan
I. Pemukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan
Strategis Provinsi**

1. Kegiatan Pembangunan PSU Perumahan Formal

Rp. 6.491.301.876,00

Rp. 6.491.301.876,00

Jambi , Januari 2019

Kepala Bidang Perumahan Rakyat
Dinas PUPR Provinsi Jambi



YENGKI FEBRIDA, ST.,MT
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690212 200003 1 001

Kasi Perumahan Formal dan Pembiayaan
Bidang Perumahan Rakyat
Dinas PUPR Provinsi Jambi,



SUMARDI, BE
Pembina Tk I (III/d)
NIP. 19620603 198207 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SIGIT IRIANTA, S.IP M.MTr**
Jabatan : Kepala UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan (ALKAL)
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT**
Jabatan : Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

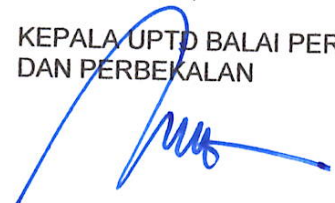
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Dinas

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD BALAI PERALATAN
DAN PERBEKALAN


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640304 199203 1 004


SIGIT IRIANTA, S.IP M.MTr
Pembina (IV/a)
NIP. 19621230 198803 1 006

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon III (UPTD-Balai Peralatan dan Perbekalan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	Panjang ruas jalan yang diperbaiki menggunakan alat-alat berat dan material/agregat UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan (km) pertahun	991,736 km
2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%

PROGRAM

JUMLAH ANGGARAN

I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur ke-PU-an	Rp.	22.301.570.000,00
	Rp.	22.301.570.000,00

Kepala Dinas PUPR
Provinsi Jambi,

I. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19840304 199203 1 004

Jambi, Januari 2019

Kepala UPTD ALKAL
Dinas PUPR Provinsi Jambi

SIGIT IRIANTA, S.IP, MMTr
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19621230 198803 1 016

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DESI KURNIA ASTUTI, ST.**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. Muhammad Fauzi, MT.**
Jabatan : Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI
DAN PENGENDALIAN,


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640304 199203 1 004


DESI KURNIA ASTUTI, ST.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19791220 200604 2 005

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon III (Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas.	1. Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	6,09%
		2. Persentase Penyelenggaraan bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	32,98%
		3. Persentase pengendalian penyelenggaraan jasa konstruksi	100%
		4. Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	100%
		5. Persentase kegiatan bidang ke-PU-an yang dimonitoring dan dievaluasi tahun berkenaan	100%
		6. Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mengikuti diklat jabatan fungsional teknis pada tahun berkenaan	100%

PROGRAM

JUMLAH ANGGARAN

I.	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Rp.	1.496.207.450,00
II.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Rp.	150.531.050,00
III.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Rp.	546.275.800,00
IV.	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur wilayah dan kawasan	Rp.	730.132.700,00
V.	Program Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Rp.	601.566.950,00
VI.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	708.295.800,00
		Rp.	4.233.009.750,00

Jambi, Januari 2019

Kepala Dinas PUPR
Provinsi Jambi,

Plt. Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian
Dinas PUPR Provinsi Jambi


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19640304 199203 1 004


DESI KURNIA ASTUTI, ST
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19791220 200604 2 005

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Monitoring dan Evaluasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	1. Jumlah Dokumen/laporan yang dikeluarkan	1 Dok/Laporan
		2. Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	2 Dok/Laporan

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

Rp. 760.800.150,00

I. Program Pengawasan Jasa konstruksi

Rp. 159.233.200,00

1. Kegiatan Monitoring dan evaluasi dan Pengendalian Penyelenggaraan jasa konstruksi

Rp. 159.233.200,00

II. Program Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan

Rp. 601.566.950,00

1. Kegiatan Monitoring dan evaluasi Kegiatan infrastruktur bidang ke-PU-an

Rp. 601.566.950,00

Jambi , Januari 2019

Plt. Kepala Bidang Bina Konstruksi
dan Pengendalian
Dinas PUPR Provinsi Jambi

Kasi Monitoring dan Evaluasi
Bidang Bina Konstruksi dan Pengendali
Dinas PUPR Provinsi Jambi,



DESI KURNIA ASTUTI, ST
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19791220 200604 2 005



DESI KURNIA ASTUTI, ST
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19791220 200604 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **TAUFIQ AKBAR, ST.**
Jabatan : Kepala Seksi Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **DESI KURNIA ASTUTI, ST.**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BIDANG BINA
KONSTRUKSI DAN PENGENDALIAN,

KASI JASA KONSTRUKSI,

DESI KURNIA ASTUTI, ST.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19791220 200604 2 005

TAUFIQ AKBAR, ST.
Penata (III/c)
NIP. 19860130 201101 1 006

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Jasa Konstruksi

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	1. Jumlah orang yang mengikuti Bintek Jasa Konstruksi 330 orang	80 org
		2. Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kemitraan dan peningkatan peran TPJK dan FJKD 560 orang	90 org
		3. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, Pembekalan dan fasilitasi uji kompetensi TTK 1070 orang	100 org
		4. Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi dan Desiminasi Aparatur dan SDM Jasa Konstruksi 430	90 org
		5. Jumlah Kegiatan yang terselenggara 13 kegiatan	2 kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

Rp. 2.033.781.100,00

I. Program Pemberdayaan Jasa konstruksi

Rp. 1.496.207.450,00

1. Kegiatan Bintek Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Konstruksi
2. Kegiatan Pemberdayaan Kemitraan dan Peningkatan Peran TPJK dan FJKD
3. Kegiatan Pelatihan, Pembekalan, dan fasilitasi uji Kompetensi TTK

Rp. 172.912.600,00

Rp. 108.387.750,00

Rp. 1.214.907.100,00

II. Program Pengaturan Jasa konstruksi

Rp. 150.531.050,00

1. Kegiatan Pembinaan Aparatur dan SDM Jasa Konstruksi

Rp. 150.531.050,00

III. Program Pengawasan Jasa konstruksi

Rp. 387.042.600,00

1. Kegiatan Penilaian Kinerja Jasa Konstruksi dan SIPJAKI

Rp. 387.042.600,00

Jambi, Januari 2019

Pit. Kepala Bidang Bina Konstruksi
dan Pengendalian
Dinas PUPR Provinsi Jambi

Kasi Jasa Konstruksi
Bidang Bina Konstruksi dan Pengendali
Dinas PUPR Provinsi Jambi,



DESI KURNIA ASTUTI, ST
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19791220 200604 2 005



TAUFIQ AKBAR, ST
Penata (III/c)
NIP. 19860130 201101 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DEVY, SE.**
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **DESI KURNIA ASTUTI, ST.**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BIDANG BINA
KONSTRUKSI DAN PENGENDALIAN,

KASI PENGENDALIAN,

DESI KURNIA ASTUTI, ST.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19791220 200604 2 005

DEVY, SE.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19721205 199604 2 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Pengendalian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	1. Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	3 Dok/Laporan
		2. Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	2 Dok/Laporan

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

Rp. 1.438.428.500,00

I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 708.295.800,00

1. kegiatan Pembinaan teknik sumber daya aparatur bidang ke PU-an

Rp. 708.295.800,00

II. Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan

Rp. 730.132.700,00

1. kegiatan penyusunan norma standar dan kriteria pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan serta penguatan NSPM dan pengembangan data infrastruktur bidang ke PU-an

Rp. 730.132.700,00

Jambi , Januari 2019

Plt. Kepala Bidang Bina Konstruksi
dan Pengendalian
Dinas PUPR Provinsi Jambi

Kasi Pengendalian
Bidang Bina Konstruksi dan Pengendali
Dinas PUPR Provinsi Jambi,



DESI KURNIA ASTUTI, ST
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19791220 200604 2 005



DEVY, SE.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19721205 199604 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NASRUL, ST.MT**
Jabatan : Kepala UPTD Balai Pengujian
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. Muhammad Fauzi, MT**
Jabatan : Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Dinas


Ir. Muhammad Fauzi, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640304 199203 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD BALAI PENGUJIAN


NASRUL, ST. MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19750610 200003 1 004

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon III (UPTD-Balai Pengujian)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan pengujian UPTD Balai Pengujian	Persentase Peningkatan Pendapatan/Retribusi bidang Infrastruktur ke-PU-an dibanding kondisi tahun awal	20%

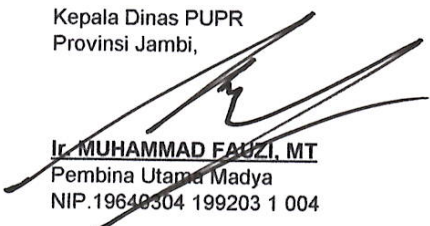
PROGRAM

JUMLAH ANGGARAN


I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur ke-PU-an	Rp.	2.900.000.000,00
	Rp.	2.900.000.000,00

Jambi, Januari 2019

Kepala Dinas PUPR
Provinsi Jambi,


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya
NIP.19640304 199203 1 004

Kepala UPTD Balai Pengujian
Dinas PUPR Provinsi Jambi


NASRUL, ST. MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19750610 200003 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **M. ARDIANSYAH, A.Md**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Pengujian
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **NASRUL, ST. MT**
Jabatan : Kepala UPTD Balai Pengujian
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD
BALAI PENGUJIAN

NASRUL, ST. MT

Pembina (IV/a)

NIP. 19750610 200003 1 004

Pihak Pertama,

KASUBBAG TATA USAHA

M. ARDIANSYAH, A.Md

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19700701 199703 1 005

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan pengujian UPTD Balai Pengujian	1. Jumlah peralatan dan bahan penunjang laboratorium yang memadai dan handal dalam mencapai hasil berstandar nasional	4 unit
		2. Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium yang dipelihara	30 unit
		3. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kelaboratoriuman	40 orang
2.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	4. Prosedur Pelayanan	86%
		5. Waktu Pelayanan	82%
		6. Biaya/Tarif Pelayanan	84,50%
		7. Produk / Hasil Pelayanan	82%
		8. Kemampuan Petugas Pelayanan	82,50%
		9. Perilaku Petugas Pelayanan	84%
		10. maklumat Pelayanan	84%
		11. Mekanisme Pengaduan Pelayanan	87,50%
		12. Persyaratan Pelayanan	87%

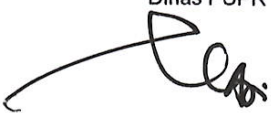
PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

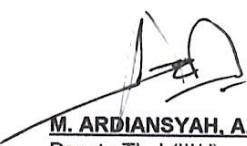
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur ke-PU-an		Rp. 2.900.000.000,00
1.	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan Penunjang Laboratorium ke-PU-an	Rp. 1.476.118.700,00
2.	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium ke-PU-an	Rp. 698.290.800,00
3.	Kegiatan Peningkatan peran dan fungsi laboratorium uji bidang ke-PU-an	Rp. 725.590.500,00

Jambi , Januari 2019

Kepala UPTD Balai Pengujian
Dinas PUPR Provinsi Jambi


NASRUL ST. MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19750610 200003 1 004

Kasubbag Tata Usaha UPTD Balai Pengujian
Dinas PUPR Provinsi Jambi,


M. ARDIANSYAH, A.Md
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700701 199703 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. TETAP SINULINGGA**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT**
Jabatan : Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Dinas

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG BINA MARGA


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640304 199203 1 004


Ir. TETAP SINULINGGA
Pembina (IV/a)
NIP. 19650903 199703 1 005

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon III (Bidang Bina Marga)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	1. Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	77,20%
		2. Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap	77,83%
		3. Persentase Panjang Jalan Provinsi yang memiliki drainase	44,72%
		4. Persentase pembangunan jembatan di jalan provinsi dalam kondisi baik	88,79%

PROGRAM

I. Program Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

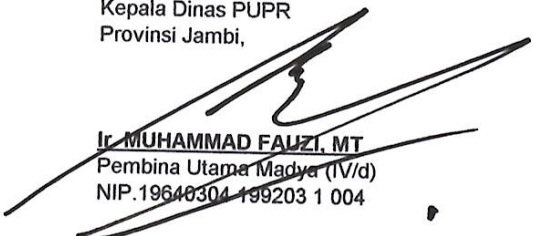
JUMLAH ANGGARAN

510.020.622.850,00


Rp. 510.020.622.850,00

Jambi, Januari 2019

Kepala Dinas PUPR
Provinsi Jambi,


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19640304 199203 1 004

Kepala Bidang Bina Marga
Dinas PUPR Provinsi Jambi,


Ir. TETAP SINULINGGA
Pembina (IV/a)
NIP. 19650903 199703 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NUSA SURYADI, ST. E.ng**
Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. TETAP SINULINGGA**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

KABID. BINA MARGA

Pihak Pertama,

KASI PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN

Ir. TETAP SINULINGGA
Pembina (IV/a)
NIP. 19650903199703 1 005

NUSA SURYADI, ST. E.ng
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760412 200501 1 009

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	1. Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah I (Kab.Tanjab Barat)	6 Km
		2. Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah II (Kab.Tanjab Timur)	11 Km
		3. Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah III (Kab.Muaro Jambi)	12,78 km
		4. Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah IV (Kab.Bungo)	13 km
		5. Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah V (Kab.Batanghari dan Ma.Jambi)	36 km
		6. Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah VI (Kab.Merangin)	13 km
		7. Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah VII (Kab.Kerinci)	7 km
		8. Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah VIII (Kab.sarolangun)	20,50 km
		9. Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah IX (Kab.Tebo)	10 Km
		10. Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah Perkotaan (Kota Jambi)	8,89 km
		11. Panjang jembatan yang dibangun di Kab.Muaro Jambi dan Kota Jambi	40 M'
		12. Panjang jembatan yang dibangun di Kab.Merangin dan Kerinci	130 M'

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

I. Program Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

	Rp. 448.091.713.700,00
1 Kegiatan Peningkatan jalan wilayah perkotaan (Kota Jambi)	Rp. 20.335.170.000,00
2 Kegiatan Peningkatan jalan wilayah I (Kab.Tanjab Barat)	Rp. 35.062.331.000,00
3 Kegiatan Peningkatan Jalan wilayah II (Kab.Tanjab Timur)	Rp. 68.432.431.000,00
4 Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab.Bungo)	Rp. 33.244.659.000,00
5 Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kab.Merangin dan Kab.Kerinci	Rp. 34.307.840.000,00
6 Kegiatan Peningkatan jalan di wilayah V (kab.Batanghari dan Muaro Jambi)	Rp. 46.508.720.000,00
7 Kegiatan Peningkatan Jalan di wilayah VI (Kab.Merangin)	Rp. 41.378.538.700,00
8 Kegiatan Peningkatan jalan di wilayah VII (Kab.Kerinci)	Rp. 39.787.043.000,00
9 Kegiatan Peningkatan jalan di wilayah VIII (Kab.Sarolangun)	Rp. 34.078.049.000,00
10 Kegiatan Peningkatan jalan di wilayah IX (Kab.Tebo)	Rp. 35.887.062.000,00
11 Kegiatan Peningkatan jalan dengan sumber dana alokasi khusus (DAK)	Rp. 26.554.006.000,00
12 Kegiatan Peningkatan jalan di wilayah III (Kab.Muaro Jambi)	Rp. 32.515.864.000,00

Jambi , Januari 2019

Kepala Bidang Bina Marga
Dinas PUPR Provinsi Jambi,

Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Bidang Bina Marga
Dinas PUPR Provinsi Jambi,

Ir. TETAP SINULINGGA
Pembina (IV/a)
NIP. 19650903 199703 1 005

NUSA SURYADI, ST, M.Eng
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19760412 200501 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **BAMBANG SUCIPTO, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. TETAP SINULINGGA**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jambi, Januari 2019

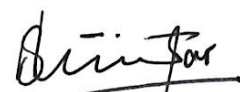
Pihak Kedua,

KABID. BINA MARGA

Pihak Pertama,

KASI PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN


Ir. TETAP SINULINGGA
Pembina (IV/a)
NIP. 19650903 199703 1 005


BAMBANG SUCIPTO, ST
Penata (III/c)
NIP. 19650727 1992

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	2. Panjang jembatan yang direhab/dipelihara di jalan provinsi	18 Lokasi

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

- I. Program Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1. Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi

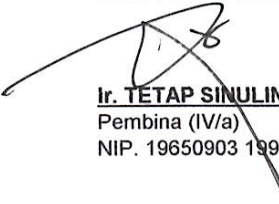
Rp. 8.882.908.300,00

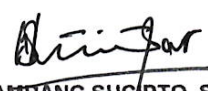
Rp. 8.882.908.300,00

Jambi , Januari 2019

Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Bidang Bina Marga
Dinas PUPR Provinsi Jambi,

Kepala Bidang Bina Marga
Dinas PUPR Provinsi Jambi,


Ir. TETAP SINULINGGA
Pembina (IV/a)
NIP. 19650903 199703 1 005


BAMBANG SUCIPTO, ST
Penata Tk.I (III/c)
NIP. 19650727 199202 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RUPINUS TARIGAN, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Teknik Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. TETAP SINULINGGA**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

KABID. BINA MARGA

Pihak Pertama,

KASI PERENCANAAN TEKNIK

Ir. TETAP SINULINGGA
Pembina (IV/a)
NIP. 19650903 199703 1 005

RUPINUS TARIGAN, ST
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700627200501 1 008

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Perencanaan Teknik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	1. Jumlah Dokumen yang direncanakan	9 Dokumen
		2. Jumlah Pengawasan yang diawasi	13 Dokumen

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

I. Program Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2TProv)

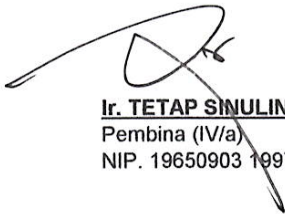
Rp. 20.183.016.000,00

Rp. 20.183.016.000,00

Jambi , Januari 2019

Kepala Bidang Bina Marga
Dinas PUPR Provinsi Jambi,

Kasi Perencanaan Teknik
Bidang Bina Marga
Dinas PUPR Provinsi Jambi,



Ir. TETAP SINULINGGA
Pembina (IV/a)
NIP. 19650903 199703 1 005



RUPINUS TARIGAN, ST
Penata (III/c)
NIP.19700627 200501 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. TAMBAT YULIS**
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. Muhammad Fauzi, MT**
Jabatan : Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Dinas

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA


Ir. Muhammad Fauzi, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640304 199203 1 004


Ir. H. TAMBAT YULIS
Pembina (IV/a)
NIP. 19670706 200003 1 004

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon III (Bidang Cipta Karya)

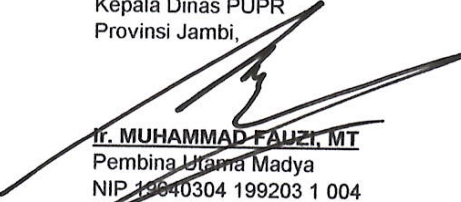
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung Universal akses	1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	85%
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	72%
		3. Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%	40%
		4. Persentase luas kawasan banjir yang tertangani (drainase)	88%

PROGRAM

JUMLAH ANGGARAN


I.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp.	1.168.675.850,00
II.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air baku	Rp.	46.193.128.100,00
III.	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Rp.	28.993.775.157,00
IV.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	25.383.460.800,00
		Rp.	101.739.039.907,00

Kepala Dinas PUPR
Provinsi Jambi,


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya
NIP 19640304 199203 1 004

Jambi, Januari 2019

Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas PUPR Provinsi Jambi


Ir. TAMBAT YULIS
Pembina (IV/a)
19670706 200003 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **R. ARTHA CAHYOKUSUMO, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Permukiman, Penataan Bangunan dan Air Minum
Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. H. TAMBAT YULIS**
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

KABID. CIPTA KARYA

Ir. H. TAMBAT YULIS

Pembina (IV/a)

NIP. 19670706 200003 1 004

Pihak Pertama,

KASI PERMUKIMAN, PENATAAN
BANGUNAN DAN AIR MINUM

R. ARTHA CAHYOKUSUMO, ST

Penata Muda Tk. I (III/b)

NIP. 19790503 201101 1 003

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Pemukiman, Penataan Bangunan dan Air Minum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung Universal akses	1. Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan (419.390 RT)	85%
2.	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	2. Jumlah gedung kantor yang terbangun	1 unit
		3. Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat	100%

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp.	21,839,156,800.00
1.	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Rp.	10,093,459,900.00
2.	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rp.	11,745,696,900.00
II. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		Rp.	36,313,350,900.00
1.	Kegiatan Penyediaan, Pengelolaan air minum dan distribusi jaringan air bersih	Rp.	36,313,350,900.00

Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas PUPR Provinsi Jambi



Ir. TAMBAT YULIS
Pembina (IV/a)
19670706 200003 1 004

Jambi, Januari 2019

Kasi Pemukiman, Penataan Bangunan dan Air Minum

Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi,



R. ARTHA CAHYO KUSUMO, ST
Penata Muda Tk. I (III/c)
NIP. 19790503 201101 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ANI FAUZIAH, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Teknik Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. H. TAMBAT YULIS**
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KABID. CIPTA KARYA

KASI PERENCANAAN TEKNIK

Ir. H. TAMBAT YULIS
Pembina (IV/a)
NIP. 19670706 200003 1 004

ANI FAUZIAH, ST
Penata (III/c)
NIP. 19790327 200701 2 006

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Perencanaan Teknik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	1. Jumlah Dokumen/laporan Perencanaan dan Pengawasan yang dikeluarkan 2. Jumlah laporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang cipta karya yang dikeluarkan	14 Dok/Lap 1 Laporan

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

I.	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Rp. 4,257,749,650.00
	1. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan bidang Cipta Karya	Rp. 1,254,982,900.00
	2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan bidang Cipta Karya	Rp. 3,002,766,750.00

Jambi , Januari 2019

Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas PUPR Provinsi Jambi

Kasi Perencanaan Teknik Bidang Cipta Karya
Dinas PUPR Provinsi Jambi,



Ir. TAMBAT YULIS
Pembina (IV/a)
19670706 200003 1 004



ANI FAUZIAH, ST
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19790327 200701 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FIKRI ABDILLA, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. H. TAMBAT YULIS**
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

KABID. CIPTA KARYA

Ir. H. TAMBAT YULIS

Pembina (IV/a)

NIP. 19670706 200003 1 004

Pihak Pertama,

KASI TEKNIK PENYEHATAN
LINGKUNGAN

FIKRI ABDILLA, ST

Penata (W/c)

NIP. 19760710 200901 1 014

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	1. Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun (IPAL/air limbah/TPA, Regional di PKN, PKNp, dan PKW	2 unit
		2. Panjang/luas daerah yang terbebas dari banjir	550 ha
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	3. Persentase pencapaian pemeliharaan sapras dasar permukiman yang berbasis masyarakat pada tahun berkenaan	100%

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

I	Program Lingkungan sehat Perumahan dan Pemukiman	Rp. 4.388.782.700,00
1.	Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi	Rp. 3.220.106.900,00
2.	Kegiatan Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Rp. 1.168.675.800,00
II.	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Rp. 5.590.959.900,00
1.	Kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana permukiman berbasis masyarakat	Rp. 5.590.959.900,00

Jambi , Januari 2019

Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas PUPR Provinsi Jambi



Ir. TAMBAT YULIS
Pembina (IV/a)
19670706 200003 1 004

Kasi Teknik Penyehatan Lingkungan
Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi,



FIKRI ADHILLA, ST
Penata (IV/c)
NIP. 19760710 200901 1 014

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AGUNG YUWANDA, ST. M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT**
Jabatan : Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019


Pihak Kedua,

Kepala Dinas
PUPR PROVINSI JAMBI


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640304 199203 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR


AGUNG YUWANDA, ST. M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19790521 200312 1 003

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon III (Bidang SDA)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	1. Persentase Jaringan/saluran Irigasi fungsional dalam kondisi baik	81%
2.	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung Universal akses	2. Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenaan	100%
		3. Persentase pengurangan daya rusak air pada tahun berkenaan	100%
		4. Persentase terpeliharanya infrastruktur SDA yang beroperasi	100%
		5. Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	100%

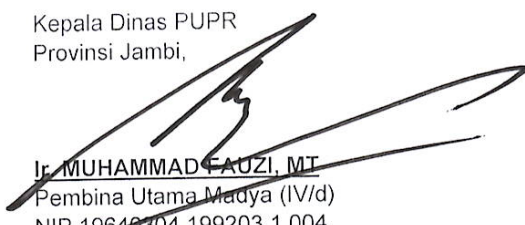
JUMLAH ANGGARAN

PROGRAM


I.	Program Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir, dan Pengamanan Pantai	Rp.	54.032.008.400,00
II.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan	Rp.	24.504.992.200,00
III.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp.	9.879.777.200,00
IV.	Program Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA	Rp.	7.024.953.215,00
V.	Program Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu	Rp.	3.029.737.985,00
		Rp.	98.471.469.000,00

Jambi, Januari 2019

Kepala Dinas PUPR
Provinsi Jambi,


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640304 199203 1 004

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas PUPR Provinsi Jambi


AGUNG YUWANDA, ST, M.Si
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19750521 200312 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RADIONO, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Sungai, Danau, dan Waduk Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **AGUNG YUWANDA, ST. M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Kedua"


Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

KABID SUMBER DAYA AIR


AGUNG YUWANDA, ST. M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19790521 200312 1 003

Pihak Pertama,

KASI SUNGAI, DANAU, DAN WADUK


RADIONO, ST
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710727 200604 1 007

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Sungai, Danau dan waduk

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung Universal akses	1. Jumlah sapras tersedianya air baku yang akan dibangun 2. Jumlah sapras tersedianya air baku yang di rehab 3. Jumlah waduk/embung/situ/bangunan penampungan air lainnya yang dibangun 4. Jumlah waduk/embung/situ/bangunan penampungan air lainnya yang direhab 5. Panjang sapras pengendalian daya rusak air wilayah I yang dibangun 6. Panjang sapras pengendalian daya rusak air wilayah II yang dibangun 7. Panjang sapras pengendalian daya rusak air yang direhab 8. Panjang sungai yang dinormalisasi 9. Panjang sapras pengaman pantai yang dibangun/direhab 10. Panjang sungai yang direvitalisasi 11. Jumlah jaringan air tanah yang berfungsi yang terpelihara 12. Panjang sarpras pengendalian daya rusak air yang dibangun/dipelihara 13. Jumlah penyediaan sumber air baku yang optimal terpelihara 14. Jumlah waduk/embung/situ serta bangunan penampung lainnya yang optimal terpelihara 15. Jumlah sapras pengendalian banjir yang optimal terpelihara	12 unit 5 unit 0 unit 0 unit 1600 m 370 m 0 m 16500 m 0 m 0 m 0 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

I. Program Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir, dan Pengamanan Pantai	Rp. 40.032.627.000,00
1. Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Wilayah I	Rp. 26.846.355.400,00 ✓
2. Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Wilayah II	Rp. 13.186.271.600,00 ✓
3. Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai	Rp. 7.342.807.200,00 ✓
II. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp. 9.879.777.200,00
1. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan sumber air baku	Rp. 9.879.777.200,00 ✓
III. Program Operasi dan Pemeliharaan infrastruktur SDA	Rp. 281.538.850,00
1. Kegiatan Operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya	Rp. 281.538.850,00 ✓

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas PUPR Provinsi Jambi

AGUNG YUWANDA, ST, M.Si
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19750521 200312 1 003

Jambi, Januari 2019
Kasi Sungai, Danau dan Waduk
Bidang SDA Dinas PUPR Provinsi Jambi

RADIONO, ST
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19710727 200604 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **LUKMAN, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Irigasi, Rawa, dan Pantai Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **AGUNG YUWANDA, ST. M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

KABID. SUMBER DAYA AIR


AGUNG YUWANDA, ST. M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19790521 200312 1 003

Pihak Pertama,

KASI IRIGASI, RAWA, DAN PANTAI



LUKMAN, ST
Penata (III/c)
NIP. 19800611 200903 1 002

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Irigasi, Rawa, dan Pantai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	1. Panjang / luas DI yang dipelihara 2. Panjang / luas jaringan DI baru yang dibangun 3. Jumlah jaringan irigasi air tanah yang dibangun 4. Jumlah jaringan irigasi air tanah yang dipelihara 5. Jumlah jaringan pembangunan tata air tambak yang dibangun 6. Jumlah jaringan pembangunan tata air tambak yang direhab/pelihara 7. Panjang/luas jaringan DR yang dibangun 8. Panjang/luas jaringan DR yang di rehab/reklamasi	1350 ha 200 ha 2 unit 2 unit 0 unit 1 unit 200 ha 2500 ha
2.	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung Universal akses	9. Panjang/luas jaringan DI yang telah dibangun yang terpelihara 10. Panjang/luas DR yang berfungsi optimal yang telah dibangun yang terpelihara	6029 ha 13039 ha

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

I. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya

- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Kegiatan Rehabilitasi/Reklamasi jaringan Rawa
- Kegiatan Rehabilitasi/Reklamasi Jaringan Rawa (DAK)

Rp. **19,129,030,600.00**
 Rp. 4,065,842,700.00
 Rp. 11,797,635,200.00
 Rp. 3,265,552,700.00

II. Program Operasi dan Pemeliharaan infrastruktur SDA

- Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun
- Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa yang telah dibangun


Rp. **6,006,786,015.00**
 Rp. 2,266,744,700.00
 Rp. 3,740,041,315.00

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas PUPR Provinsi Jambi

AGUNG YUWANDA, ST, M.Si
 Penata Tk I (III/d)
 NIP. 19750521 200312 1 003

Jambi, Januari 2019

Kasi Irigasi, Rawa, dan Pantai Bidang SDA
Dinas PUPR Provinsi Jambi,


LUKMAN, ST
 Penata (III/c)
 NIP. 19800611 200903 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DESMARITA, ST. M.Eng**
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Teknik Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **AGUNG YUWANDA, ST. M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KABID. SUMBER DAYA AIR

KASI PERENCANAAN TEKNIK

AGUNG YUWANDA, ST. M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19790521 200312 1 003

DESMARITA, ST. M.Eng
Penata (III/c)
NIP. 19711219 199303 2 004

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Seksi Perencanaan Teknik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya yang dikeluarkan	22 Dok
2.	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung Universal akses	2. Jumlah dokumen perencanaan sarana dan prasarana penyediaan sumber air baku yang dikeluarkan	2 Dok
		3. Jumlah Dokumen Perencanaan pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya	1 Dok
		4. Jumlah Dokumen Perencanaan pengendalian daya rusak air, pengendalian banjir, dan pengamanan pantai.	5 Dok
		5. Jumlah dokumen/laporan pengelolaan sumber daya air yang dikeluarkan	1 Dok/lap
		6. Jumlah Dokumen/laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bid.SDA yang dikeluarkan	4 Dok/lap

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

I. Program Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian banjir, dan Pengamanan Pantai

- 1 Kegiatan Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Rp. 6.656.574.200,00

Rp. 6.656.574.200,00 ✓

II. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan lainnya

Rp. 5.375.961.600,00

Rp. 5.375.961.600,00 ✓

IV. Program Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu

1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air
2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan bidang SDA

Rp. 3.029.737.985,00

Rp. 1.768.539.500,00 ✓

Rp. 1.261.198.485,00 ✓

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas PUPR Provinsi Jambi



AGUNG YUWANDA, ST, M.Si
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19750521 200312 1 003

Jambi, Januari 2019

Kasi Perencanaan Teknik Bidang SDA
Dinas PUPR Provinsi Jambi,



DESMARITA, ST, M.Eng
Penata (III/c)
NIP. 19711219 199303 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. EDY FERNANDO, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT**
Jabatan : Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Dinas


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640304 199203 1 004

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG TATA RUANG
DAN PERTANAHAN**


Ir. EDY FERNANDO
Pembina (IV/a)
NIP. 19650208 199503 1 001

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon III (Bidang Tata Ruang dan Pertanahan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	1. Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	100%
		2. Persentase Kegiatan Bidang Ke-PU-an yang dimonitoring dan dievaluasi tahun berkenaan	100%
2.	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	3. Persentase Penyelesaian Pengadaan Tanah	100%

PROGRAM

JUMLAH ANGGARAN

I.	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Rp. 4.066.706.850,00
II.	Program Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Rp. 432.408.300,00
III.	Program Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp. 32.862.984.850,00
		Rp. 37.362.100.000,00

Jambi, Januari 2019

Kepala Dinas PUPR
Provinsi Jambi,


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19640304 199203 1 004

Kepala Bidang Tata Ruang dan
Pertanahan Dinas PUPR Prov. Jambi


Ir. EDY FERNANDO
Pembina (IV/b)
NIP. 19650208 199503 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NASIRWAN AZRI, ST. MA**
Jabatan : Sekretaris Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT**
Jabatan : Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Dinas


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640304 199203 1 004

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS


NASIRWAN AZRI, ST. MA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611210 198703 1 009

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon III (Bagian Sekretariat)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%
		2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	100%
		3. Persentase PNS yang disiplin pada tahun berkenaan	100%
		4. Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mengikuti diklat jabatan fungsional teknis pada tahun berkenaan	100%
		5. Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada tahun berkenaan	100%

PROGRAM

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- IV. Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur
- V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

JUMLAH ANGGARAN

Rp.	5,055,517,100.00
Rp.	25,383,460,800.00
Rp.	384,000,000.00
Rp.	1,433,465,050.00
Rp.	1,509,439,650.00
Rp.	33,765,882,600.00

Kepala Dinas PUPR
Provinsi Jambi

Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya
NIP.19640304 199203 1 004

Jambi, Januari 2019

Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Jambi

NASIRWAN AZRI, ST. MA
Pembina Tk. I (IV/b)
19611210 198703 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. ZUHRI HARIANSYAH, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Bagian Sekretariat
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **NASIRWAN AZRI, ST. MA**
Jabatan : Sekretaris Dinas
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS


NASIRWAN AZRI, ST. MA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611210 198703 1 009

Jambi, Januari 2019

Pihak Pertama,

KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET


H. ZUHRI HARIANSYAH, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19781024 199903 1 002

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
 Tahun Anggaran : 2019
 Tingkat : Eselon IV Sub.bagian Keuangan dan Aset

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja dan kualitas pekerjaan UPTD dan Bidang Pendukung lainnya dilingkungan Dinas PUPR Provinsi Jambi	1. Jumlah tenaga administrasi keuangan	131 orang
		2. Periode pembayaran rekening air, listrik, dan retribusi/sewa	12 bulan
		3. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	148 unit
		4. Jumlah laporan pengelolaan aset Dinas PU Provinsi Jambi yang dikeluarkan	20 Laporan
		5. Jumlah Pengadaan komputer	50 unit
		6. Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	50 unit
2.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	7. Persyaratan Pelayanan	
		8. Prosedur Pelayanan	87,00%
		9. Waktu Pelayanan	86,00%
		10. Kemampuan Petugas Pelayanan	82,00%
			82,50%

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Rp. 819.898.600,00

Rp. 756.298.600,00

Rp. 63.600.000,00

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Kegiatan Pengadaan komputer
- Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor

Rp. 1.803.010.000,00

Rp. 1.128.560.000,00

Rp. 423.850.000,00

Rp. 250.600.000,00

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Pengelolaan aset Dinas PU Provinsi Jambi

Rp. 246.800.000,00

Rp. 246.800.000,00

Sekretaris
 Dinas PUPR Provinsi Jambi

NASIRWAN AZRI, ST. MA
 Pembina Tk. I (IV/b)
 19611210 198703 1 009

Jambi, Januari 2019

Kasubbag Keuangan dan Aset
 Sekretariat Dinas PUPR Provinsi Jambi

H. ZUHRI HARIANSYAH, SE
 Penata Tk. I (III/d)
 NIP. 19781024 199903 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SUSIYANTY, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bagian Sekretariat
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **NASIRWAN AZRI, ST. MA**
Jabatan : Sekretaris Dinas
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS

NASIRWAN AZRI, ST. MA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611210 198703 1 009

Pihak Pertama,

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUSIYANTY, SE
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19730509 200012 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SUSIYANTY, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bagian Sekretariat
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **NASIRWAN AZRI, ST. MA**
Jabatan : Sekretaris Dinas
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS

NASIRWAN AZRI, ST. MA

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611210 198703 1 009

Pihak Pertama,

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUSIYANTY, SE

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19730509 200012 2 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja dan kualitas pekerjaan UPTD dan Bidang Pendukung lainnya dilingkungan Dinas PUPR Provinsi Jambi	1. Jumlah surat keluar pertahun	3900 lbr
		2. Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	4 set/jenis
		3. Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	12 bulan
		4. Jumlah penyediaan komponen instalasi air, listrik/penerangan bangunan kantor	500 buah
		5. Jumlah peserta rapat/tamu/dll	1000 org
		6. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	300 OH
		7. Jumlah gedung kantor yang terpelihara	4 unit
		8. Jumlah meubelair yang terpelihara	20 unit
		9. Jumlah rumah jabatan yang direhab sedang/berat	1 unit
		10. Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	550 stell
		11. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat jabatan fungsional teknis	17 org

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 4.028.316.500,00

- 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, dan retribusi/sewa
- 3 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor
- 4 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- 5 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- 6 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rp. 15.000.000,00
Rp. 888.100.000,00
Rp. 2.349.592.000,00
Rp. 133.424.500,00
Rp. 158.600.000,00
Rp. 483.600.000,00

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 876.000.000,00

1. Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Rp. 876.000.000,00

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp. 384.000.000,00

- 1 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Rp. 384.000.000,00

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 311.069.250,00

- 1 Kegiatan Diklat Pelatihan Formal dan sosialisasi bidang ke-PU-an

Rp. 311.069.250,00

Sekretaris
Dinas PUPR Provinsi Jambi

NASIRWAN AZRI, ST. MA
Pembina Tk. I (IV/b)
19611210 198703 1 009

Jambi, Januari 2019

Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas PUPR Provinsi Jambi

SUSIYANTY, SE
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19730509 200012 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **WAHYUDI APDIAN NIZAM, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program Bagian Sekretariat
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : **NASIRWAN AZRI, ST. MA**
Jabatan : Sekretaris Dinas
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

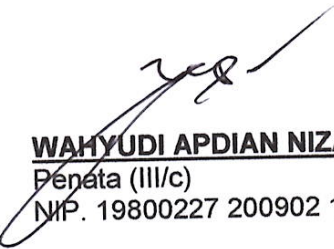
Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS PUPR
PROVINSI JAMBI


NASIRWAN AZRI, ST. MA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611210 198703 1 009

Pihak Pertama,

KASUBBAG PROGRAM


WAHYUDI APDIAN NIZAM, SE
Penata (III/c)
NIP. 19800227 200902 1 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2019
Tingkat : Eselon IV Sub.bagian Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	1. Jumlah Dokumen/Laporan koordinasi dan sinkronisasi program infrastruktur bidang ke-PU-an yang dikeluarkan	2 Dokumen
		2. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dikeluarkan	5 Laporan
		3. Jumlah dokumen Penyusunan HSPK yang dikeluarkan	1 Dokumen
		4. Jumlah Dokumen/laporan penyusunan program rencana umum dan strategis bidang infrastruktur yang dikeluarkan	2 Dok/lap
		5. Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	4 set/jenis
		6. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	28.400 eks
		7. Jumlah pelayanan informasi yang disediakan	57 info

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 226,424,500.00

1. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rp. 133,424,500.00
Rp. 93,000,000.00

II. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Rp. 287,100,000.00

1. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program infrastruktur bidang Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Rp. 287,100,000.00

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 427,250,000.00

1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Kegiatan Penyusunan Harga Dasar Satuan Upah, Bahan dan Alat
3. Kegiatan Penyusunan Program rencana umum dan strategis Bidang Infrastruktur

Rp. 117,800,000.00
Rp. 125,650,000.00
Rp. 183,800,000.00

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 835,389,650.00

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Komunikasi dan Kehumasan

Rp. 835,389,650.00

Sekretaris
Dinas PUPR Provinsi Jambi

NASIRWAN AZRI, ST. MA
Pembina Tk. II (IV/b)
19611210 198703 1 009

Jambi, Januari 2019

Kasubbag Program
Sekretariat Dinas PUPR Provinsi Jambi

WAHYUDI APDIAN, SE
Penata (III/c)
NIP. 19800227 200902 1 001